

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN PELATIHAN
APARAT PENGAWAS TERHADAP
MUTU HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

YULIZAR ADNAN

NIM. 015551488

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN PELATIHAN APARAT PENGAWASAN TERHADAP MUTU HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Januari 2011

Yang Menyatakan



YULIZAR ADNAN

NPM. 015551488

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN
 PELATIHAN APARAT PENGAWASAN TERHADAP MUTU
 HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusun TAPM : YULIZAR ADNAN

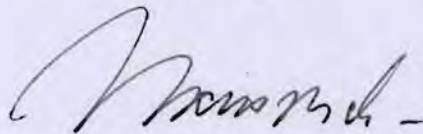
NIM : 015551488

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Hari/Tanggal : SENIN / 2 MEI 2011

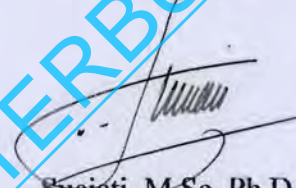
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. DR. HM. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing II



Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 195202131985032001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik
 Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si
 NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana




Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : YULIZAR ADNAN
 NIM : 015551488
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Tesis : PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN
 PELATIHAN APARAT PENGAWASAN TERHADAP MUTU
 HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,
 Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

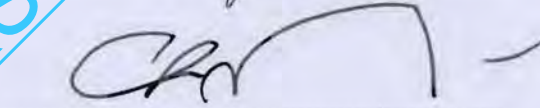
Hari/Tanggal : Senin / 2 Mei 2011

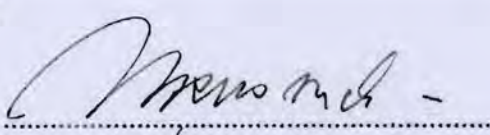
Waktu : 13:00-15:00 WIB

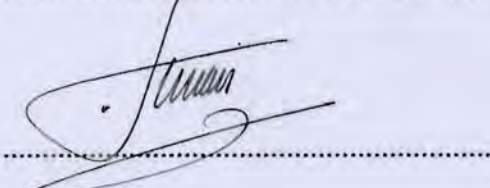
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : 
 Dr. Maman Rumanta, M.Si

Penguji Ahli : 
 Prof. Dr. Chandra Wijaya, S.Si, MM

Pembimbing I : 
 Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing II : 
 Suciati, M. Sc, Ph.D

ABSTRACT

The Influence Of Education, Experience And Education Of Supervisory Apparatus For The Quality Of Regular Inspection Of Inspectorate Of Province Of Bangka Belitung Archipelago

YULIZAR ADNAN
UNIVERSITAS TERBUKA
Yulizaradnan@ymail.com

Keywords : Education, Experience, Training, The Quality of Result of Inspection

This research aims to examine and analyze whether there are influence of education, experience and training for the quality of the result of regular inspection. The collection of Data has been done to 31 respondents which are auditors at inspectorate of province of Bangka Belitung Archipelago. This research was conducted using statistical test to see free variable to bond variable using descriptive analysis, correlation, regression and double regression.

The Results of Test of Correlation shows that there are positive relation and significance between education(X1) and the result of regular inspection (Y), it's mean that hypothesis has been proposed is proven or it can be accepted. There is positive relation and significance between training (X1) and the result of regular inspection (Y), it's mean that hypothesis has been proposed is proven or it can be accepted. The result of regression shows that there are significant result among Education(X1), Experience(X2), and Training to the result of regular inspection. The result of test has shown with equation of regression : $Y=28.143+352X1+266X2+759X3$ and $R=0,318$. The influence of education of supervisory apparatus shows that there is positive correlation (35,2%) its mean that hypothesis has been proposed is proven or it can be accepted, the influence of working experience (X2) to the quality of the result of regular inspection (Y) shows positive relation (26,6%) its mean that hypothesis has been proposed is proven or it can be accepted, the influence of training (X3) to the result of regular inspection shows positive relation(75,9%).

The conclusion, research shows the result of regular inspection is good. Education, Experience, and training have positive relation and significance to the quality of the result of regular inspection. It's advised to inspectorate of province to increase education for auditors, to have special inspection, therefore they have experience on inspection. They also have given relevant education to increase insensitive for auditors.

ABSTRAK

Pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan Terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

YULIZAR ADNAN
Universitas Terbuka
yulizaradnan@ymail.com

Kata Kunci : Pendidikan, Pengalaman, Pelatihan, Mutu Hasil Pemeriksaan

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler. Pengumpulan data dilakukan terhadap 31 responden yaitu auditor dilingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data diolah menggunakan uji statistik untuk melihat variabel bebas terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi, regresi dan regresi berganda.

Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pendidikan (X_1) dengan mutu hasil pemeriksaan reguler (Y), berarti hipotesis yang diajukan terbukti atau dapat diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengalaman Kerja (X_2) dengan mutu hasil pemeriksaan reguler (Y), berarti hipotesis terbukti atau dapat diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelatihan (X_3) dengan mutu hasil pemeriksaan reguler (Y), berarti hipotesis yang diujikan terbukti/dapat diterima. Hasil analisis regresi memperlihatkan secara bersama-sama adanya pengaruh yang signifikan antara Pendidikan (X_1), Pengalaman (X_2) dan Pelatihan (X_3) terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler dan terdapat pengaruh faktor lain terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler. Hasil pengujian secara simultan ditunjukkan dengan persamaan regresi sebagai berikut : $Y=28.143+352X_1+266X_2+759X_3$ dan $R^2=0,318$. Secara parsial pengaruh Pendidikan Aparat Pengawasan menunjukkan hubungan yang positif (35,2%) berarti hipotesis yang diujikan terbukti atau diterima, pengaruh Pengalaman Kerja (X_2) terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler (Y) menunjukkan hubungan yang positif (26,6%) berarti hipotesis yang diujikan terbukti atau diterima, pengaruh Pelatihan (X_3) terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler menunjukkan hubungan yang positif (75,9%).

Sebagai kesimpulan, penelitian menunjukkan mutu hasil pemeriksaan reguler relatif baik. Secara bersama-sama Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler. Disarankan kepada Inspektorat Provinsi untuk selalu meningkatkan pendidikan terhadap para auditor, ikut sertakan para auditor pada pemeriksaan-pemeriksaan khusus agar ditambah pengalaman dalam pemeriksaan serta diberikan kesempatan dalam mengikuti pendidikan yang relevan, menaikkan tarif insentif untuk para auditor.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah. SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN DAN PELATIHAN APARAT PENGAWASAN TERHADAP MUTU HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG “ merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Pangkalpinang.

Tesis ini diselesaikan berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

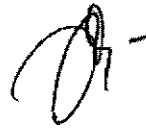
1. Prof. DR. HM Aries Djaenuri, MA selaku pembimbing I dan Suciati, M.Sc. Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga dalam penulisan ini, semoga Allah, SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya.
2. Ir. H. Eko Maulana Ali, Msc Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memotivasi dan memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini.
3. DR. Maman Rumanta, Haryono Mulyo, MA, Dr. H. Budiman yang telah bersedia memberikan sumbangan pemikiran bagi kesempurnaan tesis ini

4. Teristimewa istriku tercinta yang tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis, serta anak-anakku tersayang selama penulisan studi sampai selesainya penulisan tesis ini mau memahami dan mengerti, meskipun secara tidak sengaja penulis kurang memberikan perhatian.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan studi ini

Akhirnya dengan tulus dan ikhlas penulis berdoa semoga segala amal baik semua pihak diatas menjadi amal yang diridhoi Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal darinya.

Pangkalpinang, Januari 2011

Penulis,



YULIZAR ADNAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

13/40926.pdf

Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

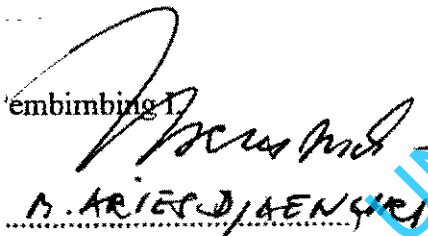
Nama/NIM : JULIZAR ADNAN
Judul TAPM : PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN
TERHADAP MUTU HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dinyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru*
diselesaikan sekitar 85...% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji* dalam Ujian Sidang
Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

29 JANUARI 2011

Pembimbing I


M. ARIE D JENYARI

Pembimbing II


(.....SUCIATI.....)

) Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. KAJIAN TEORI	13
1. Inspektorat Daerah	13
2. Pengertian Pengawasan.....	15
3. Pengertian Aparatur.....	19
4. Profesionalisme Aparatur.....	20
5. Standar Umum APFP.....	21
a. Kompetensi.....	21
b. Independensi	22
c. Kecermatan Profesi	23
d. Kerahasiaan	24
6. Norma-norma Pengawasan	25
7. Kode Etik	25
8. Pengertian Kompetensi.....	26
a. Pendidikan.....	28
b. Pengalaman.....	30
c. Pelatihan.....	32
9. Mutu Hasil Pemeriksaan.....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	36
C. Hipotesis Penelitian	39

BAB.III	METODOLOGI PENELITIAN.....	40
	A. Tempat Penelitian	40
	B. Waktu Penelitian	40
	C. Desain Penelitian	40
	1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel	42
	a. Definisi Konsep	42
	b. Definisi Operasional	45
	c. Operasionalisasi Variabel	46
	D. Populasi dan Sampel	46
	1. Populasi	46
	2. Sampel	47
	E. Instrumen Penelitian	48
	-Uji Persyaratan	50
	a. Uji Validitas Instrumen	50
	b. Uji Reliabilitas	52
	F. Prosedur Pengumpulan Data	53
	G. Metode Analisa Data	54
	1. Teknik Analisis Data Primer	56
	a. Analisa Korelasi	56
	b. Analisa Regresi	58
	1) Pengujian secara Keseluruhan (simultan) dengan uji-F	59
	2) Pengujian secara Individual (parsial)	60
	2. Tehnik Analisa Data Sekunder	61
	3. Pengujian Hipotesis	61
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	63
	A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	63
	B. Analisis Statistik Deskriptif	69
	1. Diskriptif Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y)	69
	2. Deskripsi Dimensi Pendidikan Aparat Pengawasan (x1).....	72
	3. Deskripsi Dimensi Pengalaman Aparat Pengawasan (x2).....	74
	4. Deskripsi Dimensi Pendidikan Aparat Pengawasan (x3).....	77
	C. Analisis Statistik Inferensial	79
	1. Uji Persyaratan	79
	a. Uji Validitas	79
	b. Uji Reliabilitas.....	79
	2. Analisis Korelasi	80
	3. Analisis Regresi Linear Berganda	87
	a. Pengujian secara simultan	88
	b. Pengujian secara parsial	89
	D. Uji Hipotesis Statistik	93
	1. Hubungan Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawas (X) Terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y)	93
	2. Pengaruh Antara Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan	

	Aparat Pengawas (X) Terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y)	94
	E. Pembahasan	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	105

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009	4
Gambar 1.2. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Formal	6
Gambar 1.3. Jumlah Aparat Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Fungsional	7
Gambar 1.4. Jumlah Aparat Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Teknis	8
Gambar 2.1. Kerangka Teori	38
Gambar 3.1. Data Karyawan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47
Gambar 4.1. Histogram Mutu Hasil Pemeriksaan	70
Gambar 4.2. Histogram Pendidikan Aparat Pengawas	73
Gambar 4.3. Histogram Pengalaman Aparat Pengawas	75
Gambar 4.4. Histogram Pelatihan Aparat Pengawas	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2005 sampai Dengan 2009	4
Tabel 1.2. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Formal	6
Tabel 1.3. Jumlah Aparat Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Fungsional	7
Tabel 1.4. Jumlah Aparat Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Teknis	8
Tabel 3.1. Data Karyawan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	46
Tabel 3.2. Kisi-kisi Variabel, Dimensi, Indikator	49
Tabel 3.3. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r	57
Tabel 3.4. Tabel Anova	59
Tabel 4.1. Data Objek Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
Tabel 4.2. Nilai Rata-rata Indikator Mutu Hasil Pemeriksaan	71
Tabel 4.3. Nilai Rata-rata Indikator Pendidikan	74
Tabel 4.4. Nilai Rata-rata Indikator Pengalaman Aparat Pengawas	76
Tabel 4.5. Nilai Rata-rata Indikator Pelatihan Aparat Pengawas	78
Tabel 4.6. Analisis Korelasi X_1 -Y.....	81
Tabel 4.7. Analisis Koefisien Determinasi X_1 -Y	82
Tabel 4.8. Analisis Korelasi X_2 -Y	83
Tabel 4.9. Analisis Koefisien Determinasi X_2 -Y	84

Tabel 4.10. Analisis Koefisien Korelasi X_3 -Y	85
Tabel 4.11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi X_3 -Y	86
Tabel 4.12. Hasil Analisis Koefisien Korelasi	87
Tabel 4.13. Anova Pengujian secara Simultan	88
Tabel 4.14. Koefisien Pengujian secara Parsial	90

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Kuisisioner Peneliti

Surat Pengantar Kuisisioner

Lembar Kuisisioner Pendidikan

Lembar kuisisioner Pengalaman

Lembar Kuisisioner Pelatihan

Lembar Kuisisioner Perencanaan Pemeriksaan

Lembar Kuisisioner Pelaksanaan Pemeriksaan

Lembar Kuisisioner Pelaporan

Data Uji Coba Dimensi Pendidikan (X1)

Data Uji Coba Dimensi Pengalaman (X2)

Data Uji Coba Dimensi Pelatihan (X3)

Data Uji Coba Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan (Y)

Statistik deskriptif Data (Frequencies)

Frequencies Tabel Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman

Mutu Hasil Pemeriksaan

Uji Validitas Dimensi Pendidikan (Correlations)

Uji Validitas Dimensi Pengalaman (Correlations)

Uji Validitas Dimensi Pelatihan (Correlations)

Uji Validitas Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan (Correlations)

Uji Reliabilitas Dimensi Pendidikan (Reliability)

Uji Reliabilitas Dimensi Pengalaman (Reliability)

Uji Reliabilitas Dimensi Pelatihan (Reliability)

Uji Reliabilitas Mutu Hasil Pemeriksaan (Reliability)

Correlations

Analisis Regresi X1 – Y

Analisis Regresi X2 – Y

Analisis Regresi X3 – Y

Partial Regression Plot Dependent Variable : Mutu Hasil Pemeriksaan Pendidikan

Partial Regression Plot Dependent Variable : Mutu Hasil

Pemeriksaan Pengalaman

Partial Regression Plot Dependent Variable : Mutu Hasil Pemeriksaan Pelatihan

Regression

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan dengan melalui kebijakan perekonomian daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Keluarnya kebijakan otonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai titik awal dalam rangka mempersiapkan suatu sistem yang dapat mengukur kinerja pemerintah, yakni parameter kinerja organisasi pemerintahan dan optimalisasi peran aparatur sebagai pelaksana proses pembangunan. Kedua aspek inilah sebenarnya yang menjadi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dimana dengan pemerintahan yang bersih akan terselenggaranya *Good Governance*.

Hal yang harus dipenuhi untuk mencapai *Good Governance* adalah adanya transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Salah satu indikator adanya transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi tersebut adalah rendahnya tingkat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Guna mencegah dan mengatasi korupsi digalakan lembaga pengawasan. Salah satu lembaga pengawasan yaitu Pengawasan Fungsional yang termasuk didalamnya adalah Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 11 dijelaskan bahwa “ Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit adalah Inspektorat Jendral Departemen Unit Pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Pada Tahun 2008 dikeluarkan lagi PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Nomenklatur dari Bawasda menjadi Inspektorat Daerah.

Sejalan dengan upaya untuk menantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya ini untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara *comprehensif* dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi otonomi daerah menyebabkan peran Inspektorat Daerah meningkat. Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan fungsional

pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek KKN dan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan terhadap publik.

Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan harus berani mengungkapkan temuan-temuan yang terjadi pada dinas-dinas guna menyelamatkan uang Negara. Kinerja Inspektorat Daerah harus dioptimalkan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap aparatur, keuangan dan administrasi dinas serta instansi dilingkungan pemerintah daerah. Adapun jenis temuan teridentifikasi yaitu : kasus yang merugikan Negara, pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan, penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran, hambatan terhadap kelancaran proyek, hambatan terhadap kelancaran tugas pokok, kelemahan administrasi, ketidak lancaran pelayanan terhadap masyarakat. (Dirhana, 2002 : 2)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki lembaga pengawasan daerah yaitu Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah, yang seharusnya terasa peranannya dalam mengurangi penyelewengan yang terjadi pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan provinsi ini, seperti yang dapat dilihat pada temuan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun terakhir yang disajikan dalam tabel dibawah ini, dari tabel tersebut terlihat jumlah temuan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat.

**Tabel 1.1. Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler
Tahun Anggaran 2005 s.d. 2009**

Tahun Anggaran	Jumlah Temuan	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			S	D	B
2005	285	383	359	10	14
2006	133	178	162	7	9
2007	110	155	248	2	5
2008	260	372	319	5	48
2009	368	456	408	23	25

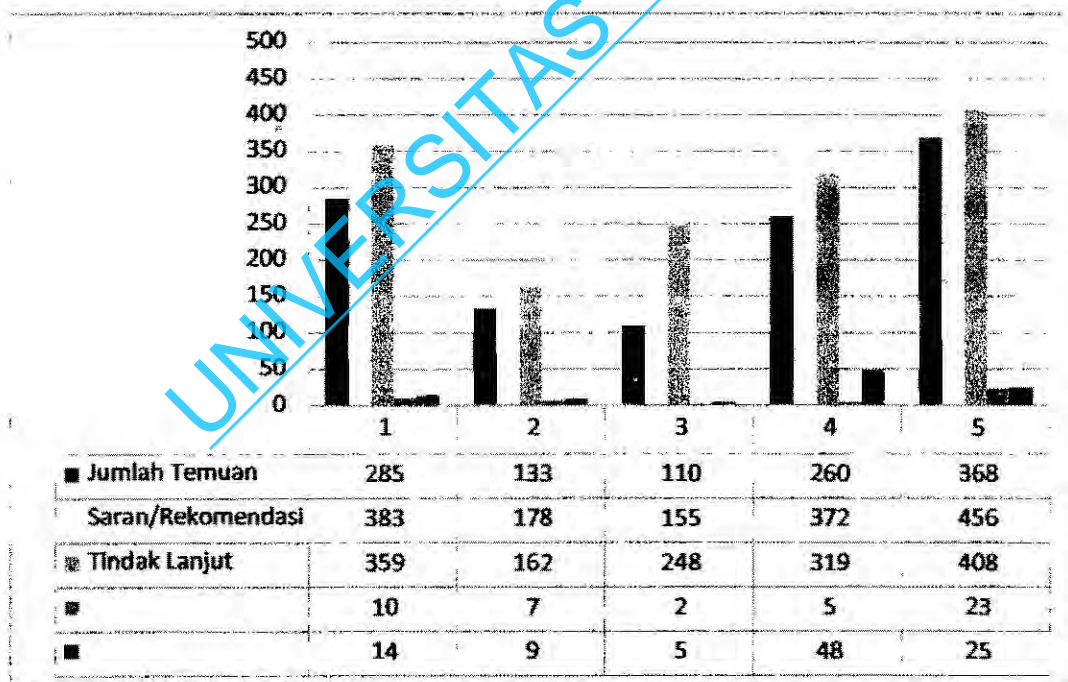
Sumber : Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan :

S = Tindak lanjut selesai

D = Tindak lanjut dalam proses

B = Tindak lanjut belum dilaksanakan



**Gambar 1.1 Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler
Tahun Anggaran 2005 s.d. 2009**

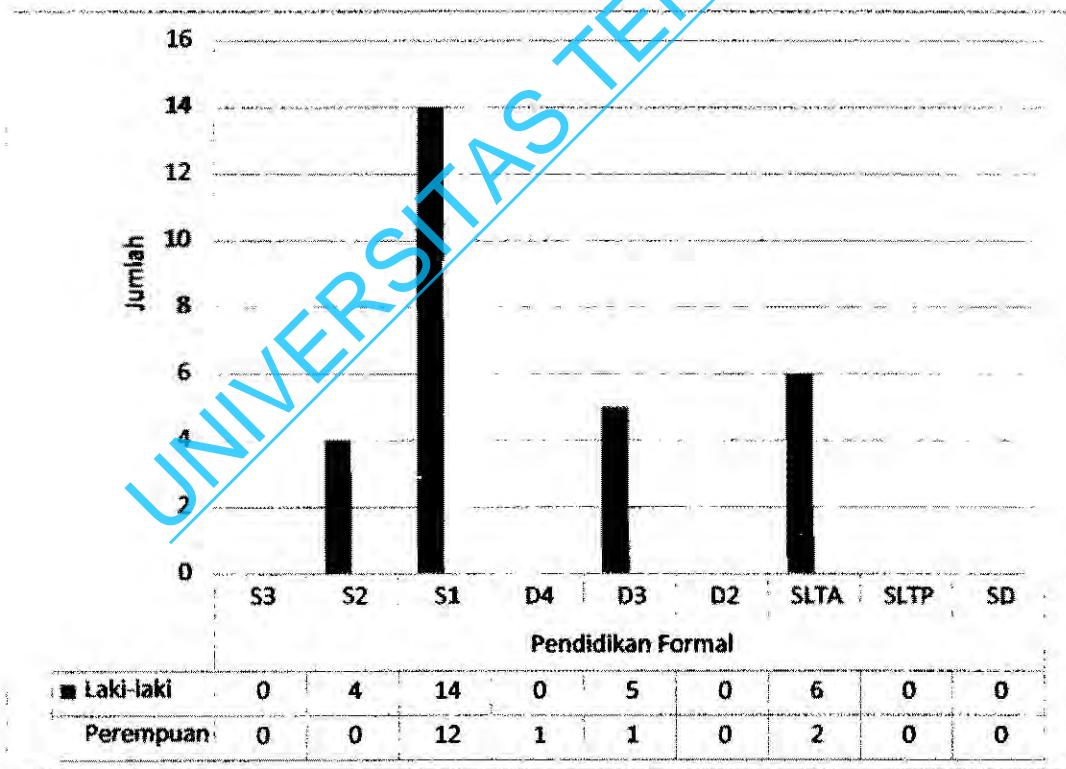
Berkaitan dengan tugas sebagai auditor internal, Inspektorat Daerah harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat, setelah itu memberikan tindakan korektif atau perbaikan yang patut disarankan. Saran atau rekomendasi adalah pendapat yang dipertimbangkan mengenai situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian mengenai pokok persoalan dan upaya mengatasinya, rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan.

Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pada pemerintahan daerah dibentuk guna membantu Kepala Daerah agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Inspektorat Daerah akan dapat berhasil dengan baik dalam melakukan pengawasan apabila aparatnya memiliki pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Tetapi kalau dilihat dari segi pendidikan, pelatihan ternyata rata-rata aparat Inspektorat Daerah mempunyai latar pendidikan dari perguruan tinggi sehingga menunjang sekali dalam melakukan pekerjaan.

Adapun pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Formal

Gender	Pendidikan Formal									Jumlah
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
Laki-Laki	-	4	14	-	5	-	6	-	-	
Perempuan	-	-	12	1	1	-	2	-	-	
Jumlah		4	26	1	6		8			45

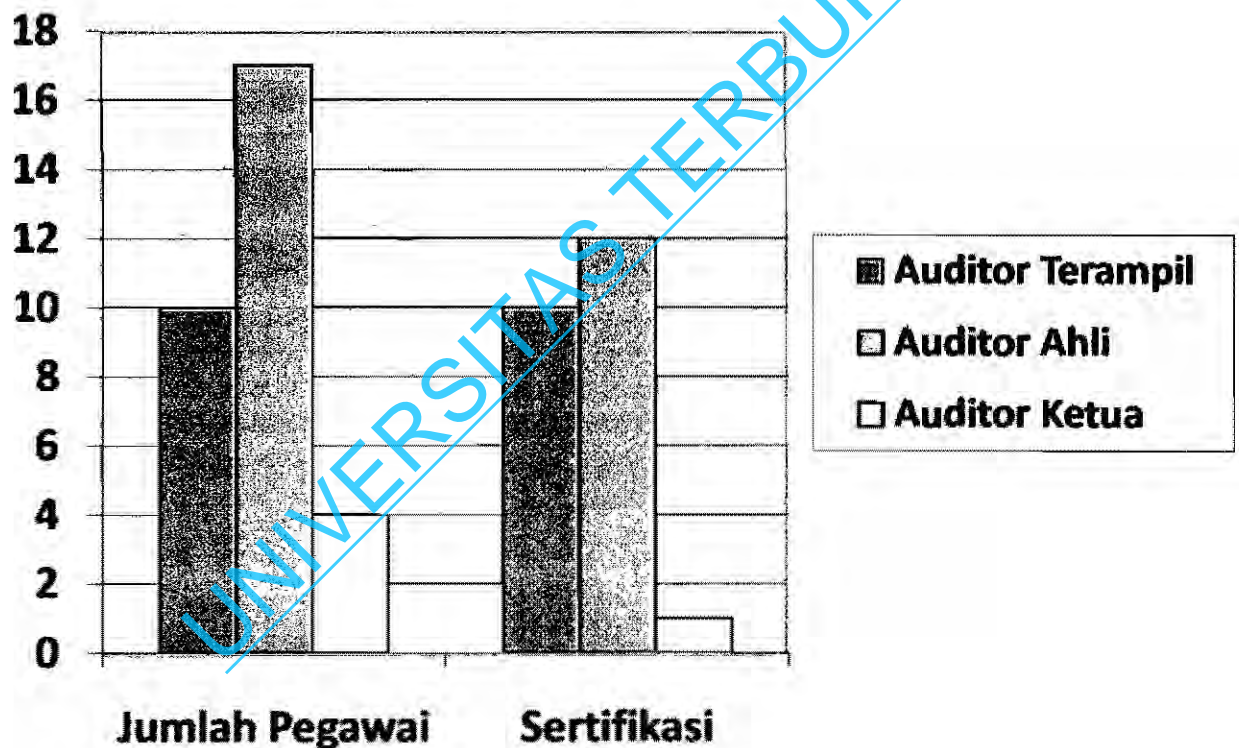


Gambar 1.2. Jumlah PNS Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel 1.3. Jumlah Aparat Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Fungsional

Jenis Diklat	Nama Diklat	Jumlah Pegawai	Sertifikasi
Fungsional	Auditor Terampil	10	10
	Auditor Ahli	17	12
	Auditor Ketua	4	1
		31	23

Sumber : Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

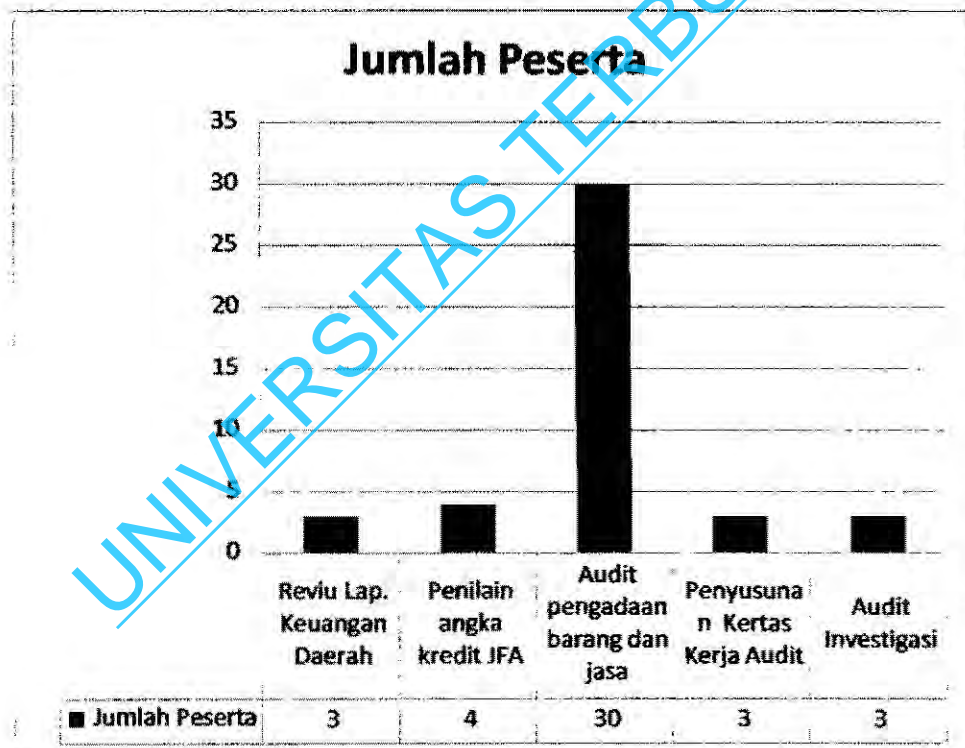


Gambar 1.3. Jumlah Aparat Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Fungsional

Tabel 1.4. Jumlah Aparat Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Teknis

Jenis Diklat	Nama Diklat	Jumlah Peserta
Teknis	1. Review Lap. Keuangan Daerah	3
	2. Penilaian angka kredit JFA	4
	3. Audit pengadaan barang dan jasa	30
	4. Penyusunan Kertas Kerja Audit	3
	5. Audit Investigasi	3

Sumber : Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 1.4 Jumlah Aparat Inspektorat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Diklat Teknis

Internal Audit Pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), Auditor APFP meliputi Auditor BPKP, Inspektorat Jendral Departemen dan Inspektorat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam menjalankan tugasnya wajib mentaati aturan perilaku yang berkaitan dengan statusnya sebagai internal audit pemerintahan.

Inspektorat Daerah harus dapat memosisikan diri dengan iklim pelaksanaan *Good Governance* yang sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga peran aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) benar-benar dapat mendukung dan mendorong proses terwujudnya *Good Governance* dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Soelendro, 2001).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah harus direncanakan terlebih dahulu, yang dituangkan dalam rencana pengawasan dan disusun dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan yang didasarkan prinsip keserasian, keterpaduan untuk menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Program kerja pengawasan tahunan ini merupakan target pemeriksaan yang harus dicapai, namun ada beberapa target pemeriksaan yang tidak tercapai hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

Setiap Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dituntut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab aparat pengawasan fungsional dapat dikerjakan dengan baik dan profesional. Jika dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah memiliki kemampuan dan sikap profesional, maka dapat diyakini bahwa hasil pemeriksaan yang disusun akan lebih baik. Jadi baik atau tidaknya suatu hasil pemeriksaan

yang disusun, dapat menggambarkan tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki aparat pengawasan. Namun fakta yang ada temuan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tiap tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat dan terlihat bahwa temuan-temuan tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan kemampuan masing-masing aparat pengawasan yang berbeda-beda dan diharapkan apabila kompetensi masing-masing Aparat Pengawasan sudah mencapai standar yang diharapkan, yaitu Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, maka diharapkan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan baik sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, aparat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti seberapa besar pengaruh pendidikan, pengalaman dan pelatihan Aparat Pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan dan bagaimana kondisi mutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat pada saat ini ?

2. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka diperoleh tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan dan tingkat mutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan, informasi yang didapat dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain yaitu :

1. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memahami pentingnya tingkat Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat Inspektorat Daerah dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan reguler yang bermutu.
2. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini sebagai masukan bahwa peningkatan Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan sangat penting dan harus dilaksanakan secara terus menerus agar

penyusunan laporan hasil pemeriksaan reguler yang disusun memiliki analisis yang tajam.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan pembangunan, membuka masa depan dan memberi kehidupan bagi masa yang akan datang. Hal ini akan mengakibatkan adanya berbagai keterbukaan disemua aspek kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan persaingan, maka hanya organisasi atau instansi yang memiliki sumber daya yang berkualitas akan mampu memenangkan persaingan tersebut, sebab kunci daya saingnya adalah manusia yang berkualitas sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif.

1. Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengawasan harus semakin ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengawasan didahului dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dalam pasal 71 dijelaskan untuk pertama kalinya istilah Pengawasan. Materi pokok dari pasal tersebut adalah menjelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan pengawasan umum di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Pada tahun 1975 dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tugas Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugas Pengawasan Umum dibantu oleh

Inspektorat Jenderal (Irjen), Gubernur dalam menjalankan tugas Pengawasan dibantu oleh Inspektorat Daerah Propinsi, Bupati/Walikota dibantu oleh **Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota.**

Kemudian dikeluarkan PP No. 20 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 11 dijelaskan bahwa "Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan pada Lembaga Non Departemen dan Badan Pengawas Daerah." Sehingga sejak tahun 2002 Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota berganti menjadi Bawasda Propinsi/Kabupaten/ Kota.

Pada Tahun 2008 keluar lagi PP 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Nomenklatur dari Bawasda menjadi Inspektorat Daerah. Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap lembaga audit yang ada. Reposisi ini dimaksudkan berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga aparatur pengawasan pemerintah tersebut, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal.

Mardiasmo (2002 : 217) mempertegas pelaku audit internal dan audit eksternal sebagai berikut :

Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) lingkungan lembaga Negara BUMN/BUMD, Bawasda Propinsi/Kabupaten/Kota dan BPKP. Sedangkan Audit Eksternal adalah audit yang dilakukan unit pemeriksa yang berada diluar organisasi yang diperiksa.

Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK, karena BPK merupakan lembaga independen dan merupakan supreme auditor.

Good Governance akan tercapai jika lembaga pengawasan berfungsi secara baik apabila lembaga pengawasan telah tertata dengan baik maka yang perlu dilakukan adalah teknis pengawasan (Mardiasmo, 2002 : 218).

2. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan itu sendiri ada baiknya dipahami terlebih dahulu. Dalam hal ini banyak pendapat para ahli tentang pengawasan walaupun hakekatnya sama.

Hendry Fayol dalam Sofyan Syafrin Harahap (2001 : 10) mengemukakan bahwa "Pengawasan mencakup upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari".

Sedangkan menurut Sunarjo (2001 : 3) definisi Pengawasan adalah :

"Pengawasan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa (objek) untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau yang disebut Kriteria. Pelaksanaannya yaitu dengan membandingkan realisasi terhadap rencana, sasaran, temuan dimana terjadi Perbedaan/ Penyimpangan atas rencana/target dan dilakukan pembinaan dengan cara diarahkan/direkomendasikan perbaikan".

Sujanto (1992 : 53) mendefinisikan Pengawasan adalah "Segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak".

Hiro Tugiman (1997) dalam standar proses audit internal mengemukakan bahwa Pengendalian adalah tindakan pengawasan yang diikuti dengan langkah perbaikan.

Kokasih (1998 : 21) mengemukakan bahwa :

“ Pengawasan sebagai proses dan fungsi manajemen yang diciptakan dalam organisasi itu diupayakan secara kontinyu, agar sesuai dengan rencana dan tindakan yang diinginkan. Pengawasan itu pun menjadi bagian dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan atau penyimpangan agar segera dapat diadakan perbaikan dan penelusuran kembali yang bersifat Preventif atau pun Represif.”

Dalam aplikasinya pengawasan dibedakan antara lain dilihat dari siapa pelaku pengawasan, objek yang diawasi atau dari segi bentuk pengawasan yang dilakukan. Tulisan ini menyoroti pada pelaku Pengawasan, khususnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Inspektorat Daerah termasuk auditor APFP.

Dalam suatu organisasi, pengawasan dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Demikian juga halnya dengan organisasi Pengawasan Fungsional, hanya merupakan salah satu unsur dari sistem pengawasan pemerintah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pengawasan Organisasi Pemerintah di Indonesia, yang dikemukakan oleh Supriyono dan Haryono Yusuf (1990 : 151) bahwa Pengawasan digolongkan menjadi dua yaitu :

(1) Pengawasan Internal (2) Pengawasan Eksternal. Pengawasan Internal digolongkan menjadi dua yaitu : (a) Pengawasan melekat (b) Pengawasan Fungsional. Pengawasan Eksternal dapat digolongkan menjadi tiga yaitu (a)

Pengawasan Legislatif atau Pengawasan Politik, (b) Pengawasan Masyarakat atau Pengawasan Sosial dan (c) Pengawasan Eksternal Eksekutif.

Dari penggolongan pengawasan pemerintah tersebut dapat kita ketahui bahwa organisasi Pengawasan Fungsional merupakan salah satu sistem dari sistem pengawasan yang luas.

Secara umum yang dimaksud dengan Pengawasan Fungsional dalam PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui Pemeriksaan, Pengujian, Pengusutan dan Penelitian. Dalam Inpres No 15 Tahun 1983 lebih dikenal dengan Pengawasan Melekat (WASKAT) dan Pengawasan Fungsional (WASNAL).

Sujanto (1994 : 18) memberikan pengertian sebagai berikut Pengawasan Melekat (WASKAT) yaitu berupa tindakan atau kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan bawahan secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.

Sedangkan Supriyono dan Haryono Yusuf (1998 : 152) memberikan pengertian bahwa : "Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa pengertian yaitu :

(1) Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah seperti Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

(a). Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Pemeriksaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
- Pemeriksaan Insidental adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- Pemeriksaan Terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga/badan/unit pengawasan secara bersama-sama.

(b). Pengujian adalah salah satu bentuk pengawasan fungsional dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.

- (c). Pengusutan adalah salah satu kegiatan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadi tindak pidana.
- (d). Penilaian adalah salah satu kegiatan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Pengertian Aparatur

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar beberapa istilah untuk menyebut pegawai pemerintah dengan kata aparatur, pegawai, personil, personalia dan karyawan namun demikian keseluruhan penggunaan istilah tersebut terkandung satu maksud yakni untuk menyebutkan pegawai pemerintah.

Pamudji (1994:21) Mengemukakan bahwa istilah aparatur Negara, aparatur kata padanannya adalah *apparat* (Belanda) dan aparatur yang salah satu artinya adalah : *"the instrument, materials, tool etc, needed for specific use, experiments etc"*.

Dalam kaitan dengan istilah aparatur pemerintah dan aparatur Negara, maka dapat diartikan sebagai alat atau sarana pemerintah/Negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kemudian terkelompok ke dalam fungsi-fungsi diantaranya pelayanan publik.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, aparat diartikan sebagai " Suatu badan pemerintah, instansi pemerintah, alat Negara yang merupakan organisasi, tata kerja dan termasuk didalamnya aparatur atau pegawai ".

Sedangkan aparatur sendiri didefinisikan sebagai perangkat, alat yang terutama pegawai negeri.

Pendapat lain yang dilontarkan oleh Wursanto (1985:27) dengan menggunakan istilah yang berbeda mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan sebagai berikut :

Istilah personil, personalia, karyawan diartikan dalam arti yang sama yaitu orang yang menyumbang tenaga dan jasa dalam suatu bentuk usaha pemerintah maupun dalam usaha swasta dan sebagai suatu imbalan jasanya ia mendapat upah dan gaji.

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini untuk membatasi dan agar lebih terarah pembahasan ini istilah pegawai hanya terkait pada kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian lebih lanjut Wursanto mengemukakan bahwa“ mereka yang menyumbangkan tenaga atau jasanya kepada badan atau bentuk usaha pemerintah dinamakan pegawai pemerintah yang lazim disebut dengan pegawai negeri”.

4. Profesionalisme Aparatur

Profesionalisme bagi seorang pegawai maupun badan/lembaga, dewasa ini bukan lagi merupakan konsep dan angan-angan semata, akan tetapi dengan semakin ketat dan kompleknya persaingan serta seiring dengan besarnya tuntutan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat pada umumnya maka telah menjadi suatu kebutuhan. Hal ini disebabkan ditangan para profesional segala sesuatu akan menjadi lebih baik, karena kaum profesional adalah melaksanakan pekerjaan dilandasi dengan bekal pengalaman, ketrampilan, pengetahuan dan komitmen serta taat pada etika profesi, yang didapat melalui pendidikan, baik formal maupun pelatihan (Soetedjo, 2003).

Dalam hubungan dengan organisasi pemerintah, pegawai negeri berada dalam posisi sebagai pelayan publik. Pegawai yang termasuk dalam golongan tenaga profesional dan profesionalisme pegawai dapat dilihat seperti diungkapkan oleh Pamudji (1994 : 22) bahwa “Seseorang yang tergolong profesional yang berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan (pekerjaan) diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya”.

5. Standar Umum APFP

Pengertian dari Standar Umum APFP adalah sebagai kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan baik memahami teknik dan manajemen pemeriksaan maupun memahami objek pemeriksa

a. Kompetensi.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan, maka auditor internal harus terdiri dari tenaga-tenaga yang cakap, mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis audit dengan standar yang tinggi, memiliki daya imajinasi serta inisiatif dan mampu berhubungan dengan bagian lainnya dalam organisasi. Dimana Kompetensi sendiri melibatkan proses berkesinambungan antara pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Shanteau : 1988).

Menurut pendapat Sondang P. Siagian, 1999 : 127 sebagai berikut :

“ Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang memangku suatu jabatan dan pengalaman “saka guru” yang berharga. Kombinasi antara pendidikan dan pengalaman merupakan salah satu kunci keberhasilan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang dan pelatihan

yang pernah diikutinya mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan”

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa. Sebagai tim pemeriksaan dilakukan oleh beberapa orang pemeriksa. Kompetensi harus dilihat bukan secara individu pemeriksa melainkan dalam satu tim, dimana pemeriksa saling bekerja sama. Tim bukanlah gabungan dari pemeriksa yang berlatar belakang pendidikan yang sama, melainkan kombinasi dari beberapa pemeriksa yang memiliki kompetensi yang saling melengkapi, misalnya pengawasan untuk pemeriksaan regular pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dilakukan oleh satuan tim yang terdiri atas pemeriksa yang mengerti masalah keuangan, pekerjaan tehnik sipil, masalah hukum serta kepegawaian.

Kompetensi yang dimiliki oleh para pemeriksa adalah kemampuan yang relevan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan seperti seorang pemeriksa dengan latar belakang tehnik sipil mendapat penugasan pemeriksaan masalah gedung dan bangunan, bukan mendapat penugasan pemeriksaan masalah keuangan. Tim pemeriksaan ini akan dikatakan kompeten secara kolektif apabila masing-masing pemeriksa dapat mengkombinasikan kemampuannya.

b. Independensi

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi/lembaga audit dan auditor pemerintah maupun akuntan publik harus independen (secara organisasi maupun pribadi), bebas dari gangguan intervensi yang bersifat pribadi dan yang diluar pribadi yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang

independen. Atas dasar itu, pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tidak boleh memihak salah satu pihak tertentu.

c. Kecermatan Profesi

Profesi auditor internal tidak luput dari *human error* padahal seperti halnya bidang profesi lainnya, auditor dituntut untuk menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus dengan kehati-hatian, ketekunan dan kompetensi serta mempunyai kewenangan untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang diperiksa memperoleh manfaat yang diberikan oleh auditor internal tersebut.

Dalam standart audit yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 01 SA Seksi 150 menyebutkan bahwa : “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Standar umum ini mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. Standar ini menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam pemilihan teknologi, dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit. Pertimbangan sehat juga

harus diterapkan dalam pelaksanaan pengujian dan prosedur serta evaluasi dalam melaporkan hasil audit.

Kecakapan profesional dibuktikan dengan kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan dapat diukur apabila pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Namun sebagai prasyarat maka kecakapan profesional ini dapat diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Mengingat objek pemeriksaan adalah pemeriksaan regular, maka kecakapan profesional sebagai prasyarat mengharuskan adanya latar belakang pendidikan keuangan, tehnik sipil, hukum dan kepegawaian. Namun tidak semata-mata harus sesuai dengan disiplin ilmu yang melatarbelakangi pendidikan para pemeriksa, karena pengalaman atau jam terbang dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan akan lebih menjamin profesionalisme dalam penugasan

d. Kerahasiaan

Sebagai satuan kerja yang tugasnya melakukan pengawasan dibidang keuangan daerah, maka Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan audit atau informasi yang dihasilkan dari audit tersebut, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah dari pihak yang berwenang. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) tidak diperkenankan menggunakan informasi yang diperolehnya dari suatu penugasan audit.

Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (AIA) harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut

tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional / hukum untuk mengungkapkannya”.

6. Norma-Norma Pengawasan

Pengertian Norma-Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawasan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak atau pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.

(Inspektorat Jendral Depdagri : Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri)

Norma pengawasan meliputi :

- a. Norma Umum
- b. Norma Pelaksanaan
- c. Norma Pelaporan

7. Kode Etik

Kode etik pejabat pengawasan adalah seperangkat prinsip-prinsip moral/nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawasan pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. (Inspektorat Jendral Depdagri: Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri)

Berdasarkan hasil Kongres Ke Tujuh IAI 1998 menetapkan Kode Etik Akuntan Indonesia sebagai berikut:

- (1) Tanggungjawab Profesi (2) Kepentingan Publik (3) Integritas (4) Objektivitas (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (6) Kerahasiaan (7) Perilaku Profesional (8) Standar Teknis

Berdasarkan penjelasan butir-butir diatas Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah sebagai auditor pemerintah daerah harus menjalankan Kode Etik tersebut, walaupun Kode Etik Akuntan Indonesia dan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), namun pernyataan yang dikeluarkan oleh IAI tersebut, secara garis besar telah dimuat didalam Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

8. Pengertian Kompetensi

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Payaman 2005 : 1). Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang digolongkan pada tiga kelompok yaitu : (1) kompetensi individu orang yang bersangkutan (2) dukungan organisasi (3) dukungan manajemen.

Kompetensi individu adalah kemampuan dan ketrampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang di pengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan dalam dua golongan. Yaitu (a) kemampuan dan ketrampilan kerja (b) motivasi dan etos kerja (Payaman 2005 : 6)

Kompetensi adalah kemampuan profesionalisme merupakan tanggung jawab dari bagian internal audit dan masing- masing pemeriksa internal. Pimpinan pemeriksa internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. (Hiro Tugiman: 2000 : 18).

Kompetensi menurut Spencer dalam Moehariono (2009 : 3) adalah “ A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related

to criterion referenced affective and or superior performance in a job or situation
”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

“ Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode tertentu ”.

Mc Clelland dalam (Moeheriono : 4) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau pada situasi tertentu.

Pandangan mengenai kompetensi aparat pengawasan berhubungan dengan masalah kemampuan (keahlian) yang dimiliki aparat pengawas yang didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dengan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta pelatihan. Kompetensi yang dimiliki aparat pengawasan adalah kemampuan yang relevan dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakannya.

Secara rinci ada lima dimensi kompetensi yang dimiliki oleh semua individu yaitu sebagai berikut :

1. Ketrampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja (*Task skills*)
2. Ketrampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan. (*Task management skills*).
3. Ketrampilan yang mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan (*Contingency management skills*).

4. Keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja (*Job role environment*)
5. Keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru (*Transfer skills.*) (Moeheriono : 2009 : 15)

Kompetensi melibatkan proses berkesinambungan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (Shanteau : 1988). Keahlian merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami (Drefus : 1986) menyatakan keahlian seseorang merupakan suatu gerakan yang terus-menerus yaitu berupa proses pembelajaran dari mengetahui sesuatu menjadi mengetahui bagaimana.

Kompetensi aparatur pengawasan fungsional pemerintah yang tugasnya mengawasi keuangan daerah haruslah memiliki pendidikan, pengetahuan, pengalaman, serta pelatihan sehingga kompetensinya tidak diragukan lagi.

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Tingkat pendidikan merupakan prasyarat untuk memegang jabatan tertentu, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Biasanya pendidikan formal merupakan prasyarat mutlak sedangkan pendidikan nonformal merupakan penunjang. Pendidikan diukur melalui jenjang pendidikan formal yang terakhir ditempuh, latar belakang pendidikan, pendidikan tambahan yang pernah diikuti sebagai penunjang pendidikan formal.

Sehubungan dengan betapa pentingnya pendidikan, Edwin B. Flippo (dalam Malayu S.P Hasibuan, 2002 : 69) mengemukakan bahwa:

“ Education is concerned with increasing general knowledge and understanding of our total environment “. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.

Didalam undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 dijelaskan bahwa : Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

“ Pendidikan formal merupakan tempat untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis dan kemampuan analisis dengan menggunakan rasio, berkomunikasi dengan bahasa, mengekspresikan ide, kerja sama serta pembentukan sifat untuk menjadi manusia yang siap berpartisipasi serta berbudaya” (Azril Azhari : 2000).

Semakin tinggi pendidikan yang telah ditempuh, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sesuai dengan bidang pekerjaan, maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Pengalaman intelektual ini akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Bagi aparat pengawasan, semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, maka makin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimilikinya.

Heidjrachman Ranupandoyo dan Suad Husnan (2002 : 77) mengemukakan bahwa :

“ Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan untuk memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan “.

Dalam menilai kemampuan seseorang, perlu ditinjau latar belakang pendidikan.

Menurut Simanjuntak (1995 : 67) mengatakan bahwa” Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan tepat. Latihan membentuk dan meningkatkan ketrampilan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan serta latihan seseorang semakin tinggi pula kemampuan kerjanya.”

Menurut Sawyer yang disadur oleh PPA-STAN (1985 : 2) bahwa :

“Pemeriksa internal yang baik adalah mereka yang mempunyai kesanggupan teknis dan pendidikan yang memadai disamping kemampuan untuk menyesuaikan diri, bijaksana, mempunyai ketegasan sikap, jujur, independen, objektif dan mempunyai rasa tanggung jawab.”

Auditor internal juga dituntut yang berpengalaman, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haryadi (1992 : 103) sebagai berikut :

“Karena faktor pengalaman (langsung) memang berperan penting bagi pertumbuhan sikap yang kuat terhadap suatu objek”. Dengan pengalaman kerja yang cukup, maka ketrampilan auditor internal dalam melaksanakan audit tidak diragukan lagi, begitu juga dalam hal memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dan pengalaman dalam bekerja maka auditor internal dapat menghasilkan informasi dan saran yang diharapkan oleh pemakai. Selain harus memiliki pendidikan, pengalaman auditor internal juga harus mengikuti pelatihan. Pelatihan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap dan ketrampilan serta pengetahuan individu yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/badan/organisasi”.

b. Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu bekal yang harus dimiliki dan diterapkan untuk dapat mengenal organisasi secara lebih dekat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pengalaman akan lebih mudah menyelesaikan masalah karena sudah terbiasa melakukannya dan akan menambah wawasan karena dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Lugito dan Cornell (1985) berpendapat bahwa :

“ Berbagai macam pengalaman individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas, mereka berpendapat bahwa seseorang berpengalaman akan memiliki cara

berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan *sophisticated* di bandingkan dengan orang yang belum berpengalaman “.

Aston dan Kramer (1980) menunjukkan bahwa :

“ Pengaruh pengalaman akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas tugas dalam bidang pengauditan. Sementara peneliti Mauntz dan Sharaf (1993) menunjukkan adanya pengaruh pengalaman yang signifikan terhadap pembuatan keputusan yang lebih kompleks seperti mencari kelemahan sistem pengendalian internal, mencari kesalahan pencatatan serta melakukan *analitical review*.

Menurut Stephen P. Robbins (2001 :240) bahwa :

“ *Experience maybe acquired directly through observation or practice, or it maybe acquired indirectly, as through reading* “ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengalaman dapat diperoleh langsung lewat pengamatan atau praktek, atau belajar itu dapat dihasilkan dari pengalaman tidak langsung seperti yang diperoleh dari membaca.

Pengalaman (*experience*) menurut Wayne (1992 : 260) adalah sebagai berikut :

“ *Experience is the factor appraise the length of the time ussualy or trade knowledge, to learn to perform the work affectively* “.

Yang dapat diartikan bahwa pengalaman adalah suatu faktor untuk menilai seberapa lama seseorang mengetahui / bertukar pengetahuan dengan orang lain untuk bisa melaksanakan pekerjaannya secara efektif.

c. Pelatihan

Pelatihan menurut Flippo sebagaimana dikutip oleh Moekiyat (1993 : 1) adalah :

“ *Training is an act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job* “, jadi pelatihan merupakan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Menurut Moekiyat (1993 : 3) tujuan umum pelatihan adalah :

1. Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat disesuaikan dengan lebih cermat dan lebih efektif.
2. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
3. Mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemajuan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan pimpinan.

Seperti yang dikemukakan oleh Greer (2001 : 39) bahwa :

“ *Training also maybe viewed as the solution to a number of peoble, such as substandara quality resulting from skill deficiencies and volantary turn over of employee seeking more rewarding jobs* “

Dari uraian diatas dapat diungkapkan bahwa pelatihan memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi maupun karyawan yang bersangkutan.

Dengan program pelatihan diharapkan dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi serta mengatasi kelemahan-kelemahan aparatur pengawasan.

Inspektorat daerah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap aparatur pengawasan, baik untuk memenuhi kebutuhan lembaga inspektorat daerah maupun dalam rangka pengembangan karir aparatur pengawasan.

9. Mutu Hasil Pemeriksaan

Yang dimaksud Mutu Hasil Pemeriksaan adalah Suatu kondisi dimana hasil pemeriksaan disusun sesuai dengan norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan serta langkah-langkah kerja yang ditetapkan dan ketepatan keandalannya tidak diragukan lagi.

Norma pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin mutu pengawasan, mutu laporan hasil pemeriksaan dan persamaan pandangan serta pendapat yang berkaitan dengan manfaat pengawasan.

Untuk mendapatkan mutu hasil pemeriksaan yang baik, menurut Yani (1992) dalam Petunjuk Pemeriksaan Operasional PPA-STAN “ seorang auditor/pemeriksa harus melaksanakan prosedur seperti perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, membuat laporan, pemantauan tindak lanjut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penentuan ruang lingkup pemeriksaan
 - Perencanaan kegiatan perlu diadakan guna mengidentifikasi bidang-bidang yang akan dicakup, dan untuk memungkinkan penjadwalan secara sistematis serta penggunaan sumberdaya manusia

secara maksimal. Pemeriksaan operasional harus meliputi semua aspek yang penting dari kegiatan satuan kerja. Oleh karena itu pemeriksaan tidak terbatas masalah-masalah akuntansi dan dokumen-dokumen tetapi juga ruang lingkupnya menyeluruh atas kegiatan, program, ketaatan pada peraturan, efisiensi dan kehematan.

- **Membuat program kerja pemeriksaan (PKP)**
 - Tujuan pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai sesuai dengan program kerja pemeriksaan. Program kerja pemeriksaan ini harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langka kerja yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan, dan harus fleksibel. Dalam penyusunan program kerja pemeriksaan perlu memperhatikan norma pemeriksaan.

- **Penentuan jenis pemeriksaan**
 - Dalam kegiatan pemeriksaan, penentuan jenis pemeriksaan adalah sangat penting, hal ini dikarenakan harus ada kejelasan pekerjaan dan yang harus dilakukan oleh masing-masing pemeriksa, dengan demikian dapat terhindar terjadinya duplikasi pekerjaan.

- **Pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan**
 - Bukti-bukti pemeriksaan merupakan informasi khusus yang diperoleh pada saat pemeriksaan melalui pengamatan, wawancara dan memeriksa catatan-catatan.

- Pembuatan kertas kerja pemeriksaan (KKP)
 - Kertas kerja pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan yang dibuat dari data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Setiap pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada saat melaksanakan tugasnya. Manfaat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) ini sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan dan sebagai alat atasan untuk melakukan review dan mengawasi pekerjaan pemeriksaan para petugas pemeriksa serta sebagai alat pembuktian dari laporan hasil pemeriksaan.

- Pembuatan laporan yang mengacu pada norma, konsisten, dan rekomendasi
 - Setiap laporan pemeriksaan harus bertujuan menyatakan kewajaran laporan dan harus disusun dan memuat ruang lingkup pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak dan memuat temuan serta kesimpulan pemeriksaan secara objektif dan lengkap serta memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif.

- Laporan disampaikan secara tertulis, segera dan tepat waktu.

- Laporan harus ditulis agar dapat dimengerti oleh setiap orang bahkan harus dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak begitu mengenal seluk beluk program, kegiatan instansi yang diperiksa. Seperti halnya dengan kegunaan, ketepatan waktu merupakan hal yang penting bagi laporan hasil pemeriksaan. Suatu laporan yang sudah dipersiapkan dengan baik akan berkurang nilainya, apa bila terlambat diterima karena informasi yang dilaporkan tidak dapat dipergunakan dalam membuat keputusan yang diperlukan.

Masalah-masalah yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan sering kali bermula pada perencanaan serta tahap-tahap analisa. Penundaan yang terjadi pada laporan-laporan sering disebabkan karena adanya masalah-masalah yang belum terpecahkan atau tidak dipertimbangkan sebelumnya. Masalah-masalah tersebut seharusnya diselesaikan pada tahap pengembangan temuan-temuan. Integrasi penyusunan laporan dengan tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan harus dapat membantu mengungkapkan temuan serta memungkinkan penyelesaian laporan tepat pada waktunya.

B. Kerangka Berpikir

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah Kabupaten/Kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih transparan, bertanggungjawab atas keputusan yang diambil (Soelendro : 2000).

Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang secara kelembagaan melekat pada organisasi Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintah propinsi meliputi seluruh keuangan daerah dan keuangan lain yang dilimpahkan gubernur .

Inspektorat harus memiliki Profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sehingga harus memperkuat berbagai unsur dalam dirinya yaitu :

1. Kompetensi dibidang audit
2. Independensi
3. Bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya
4. Sanggup menyimpan rahasia atas informasi yang masuk belum dipublikasikan

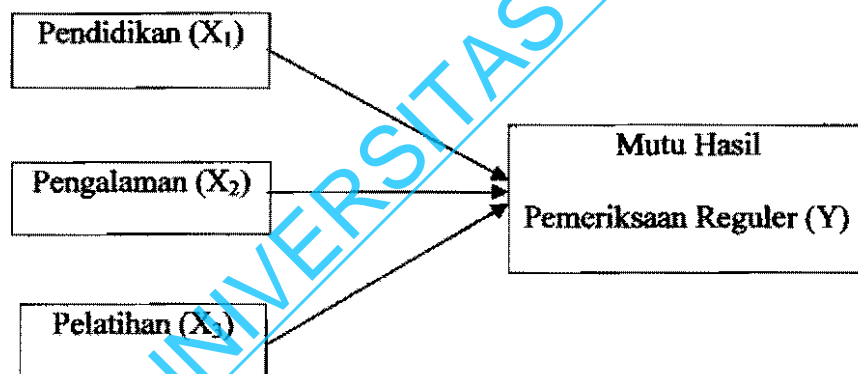
Penelitian Lee dan Stone (1995) menyatakan Kompetensi dan Independensi merupakan dua karakteristik yang saling bergantung. Kompetensi merupakan karakteristik yang pertama kali harus dimiliki sebelum seorang auditor dapat bertindak independen. Seorang auditor yang tidak kompeten maka pasti tidak akan independen karena tidak mampu menyelesaikan tugas auditnya. Apapun bentuk tugas auditnya jika aparat pengawas tidak memiliki kompetensi yang cukup maka dalam menghadapi kompleksitas tugas yang membutuhkan pengetahuan khusus maka tidak akan dapat mencari bukti-bukti yang relevan.

Kompetensi aparat pengawas sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan aparat pengawas, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman-pengalamannya sebagai pemeriksa.

Dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengawas, maka aparat pengawas tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang berpatokan pada norma-norma pemeriksaan dan menyesuaikan tugas pemeriksaan dengan baik.

Hasil pelaksanaan pengawasan berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pejabat pengawasan pemerintah melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pemerintah daerah melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan dapat pula melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (Permendagri no 23 tahun 2007 tentang tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah). Pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan sesuai aturan dan norma-norma pengawasan maka akan menghasilkan laporan pemeriksaan reguler yang bermutu.

Berdasarkan uraian-uraian dalam kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Teori

Keterangan :

X_1 = Pendidikan

X_2 = Pengalaman

X_3 = Pelatihan

Y = Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu variabel bebas (*independent variables*) dan variabel tak bebas (*dependent variables*). Yang termasuk variabel bebas adalah Pendidikan (X_1), Pengalaman (X_2), dan Pelatihan (X_3), sedangkan variabel tak bebas adalah Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y).

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.
2. Semakin tinggi pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan maka semakin bagus mutu hasil pemeriksaan reguler.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. TEMPAT PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena setelah diadakan studi dokumentasi ditemukan permasalahan yang akan diteliti.

B. WAKTU PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dari bulan April sampai dengan September 2010 mulai dari observasi ditempat penelitian sampai dengan analisa data dan perumusan kesimpulan.

C. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif mempunyai karakteristik, diantaranya desain penelitian jelas dan rinci serta ditentukan secara mantap sejak awal, bertujuan menguji teori, tehnik penelitian survey, kuesioner dan observasi. Instrumen yang dipakai adalah angket yang sampelnya representatif, data deduktif dan analisa dilakukan setelah pengumpulan data bersifat deduktif dengan menggunakan statistik (Sugiono : 2007)

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang akan dilakukan pengumpulan data dilapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis survei, yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap suatu objek dilapangan dengan mengambil sampel populasi yang ada dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun : 1991 : 3)

Metode survei menurut Kerlinger dalam Riduan (2008 : 49) Survey adalah “ Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis ”. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel representatif (Kerlinger dalam Sugiyono, 2007).

Tingkat eksplanasi menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2007) adalah “tingkat penjelasan”. Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel 1 (satu) dengan variabel lainnya.

Berdasarkan dari pengertian para pakar diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa metode eksplanasi sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu untuk memperoleh penjelasan pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Secara operasional, variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Menurut Singarimbun dalam Ridwan (2009) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

a. Definisi Konsep

Untuk memahami konsep penelitian ini, maka digunakan definisi sebagai berikut, Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (Hiro Tugiman : 1997).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pejabat pengawas pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan pemerintah dalam rangka menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisien dan kehematan dalam penggunaan sumber daya.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, kepegawaian daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan.

Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kompetensi adalah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang bersumber dari pendidikan formal, pengalaman yang dirasakan serta pelatihan yang pernah diikuti.

Kompetensi aparat pengawasan berkaitan dengan masalah kemampuan/keahlian yang dimiliki aparat pengawas yang didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal yang ditempuh dengan disiplin ilmu yang relevan dan juga pengalaman yang pernah dialami serta pelatihan yang pernah diikuti. (Moehariono : 2009)

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, semakin tinggi pendidikan aparat pengawasan maka semakin tinggi pengalaman intelektualnya hal ini akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

Pengalaman merupakan salah satu bekal yang harus dimiliki dan diterapkan untuk dapat menjalankan organisasi secara lebih dekat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pengalaman akan lebih mudah menyelesaikan

masalah karena sudah terbiasa melakukannya dan wawasan akan bertambah karena dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat pengawasan memegang peranan penting dalam meningkatkan produktifitas aparat pengawas yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kemampuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Norma pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin mutu pengawasan, mutu laporan hasil pemeriksaan, persamaan pandangan dan pendapat berkaitan dengan manfaat pengawasan, disamping itu norma pengawasan juga dimaksudkan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan bagi pejabat pengawasan pemerintah (Permendagri no. 28 tahun 2007, lampiran 1). Mutu Hasil Pemeriksaan adalah suatu kondisi dimana laporan hasil pemeriksaan disusun melalui tahapan-tahapan dan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan (Standart Audit) dimana ketepatannya serta keandalannya tidak diragukan lagi.

Hasil pelaksanaan pemeriksaan dituangkan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHP juga merupakan bukti hasil penyelesaian tugas pemeriksaan bagi tim pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun memiliki dua peran yaitu sebagai laporan pelaksanaan penugasan pemeriksaan (laporan hasil kerja pemeriksa dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan) dan sebagai laporan penilaian pemeriksa atas obyek yang diperiksa. (John, Setiawan : 2009 : 77)

Dalam petunjuk pemeriksaan operasional (Pusat Pengembangan Akuntansi : STAN) Laporan hasil pemeriksaan harus memenuhi standar laporan pemeriksaan yaitu : adanya temuan, kriteria, sebab, akibat dan ada rekomendasi. Laporan

pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disusun segera setelah selesainya pekerjaan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Standart Pemeriksaan akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik. Standart Pemeriksaan adalah ukuran kualitas hasil pemeriksaan. Sebagai ukuran kualitas, Standart Pemeriksaan tidak mengatur bagaimana melakukan pemeriksaan tetapi apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan. Untuk mendapat mutu hasil pemeriksaan yang baik, pemeriksaan harus melalui prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yaitu: perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah suatu definisi ilmiah yang amat membantu didalam menggunakan variabel-variabel. Menurut Singarimbun dalam Ridwan (2009) bahwa definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variable-vaariabel penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan, maka variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent) yang mencakup Pendidikan (X_1), Pengalaman (X_2), Pelatihan (X_3), sedangkan variabel tak bebas (dependent) adalah mutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Bangka Belitung.

c. Operasionalisasi Variabel

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap variabel penelitian, berikut ini akan diberi penjelasan dan pengukuran variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut akan dianalisis dalam penelitian adalah untuk menjelaskan kemampuan aparat pengawasan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (variabel independen) terhadap mutu hasil pemeriksaan regular (variabel dependen) dimana variabel-variabel tersebut akan diukur dengan skor yang berskala ordinal dengan skor antara 1 sampai dengan 5 dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah kuisisioner. Variabel independen akan diberi lambang X yang terdiri dari pendidikan (X_1), pengalaman (X_2), dan pelatihan (X_3) sedangkan variabel dependen akan diberi lambang Y, yaitu mutu hasil pemeriksaan.

D. POPULASI DAN SAMPEL

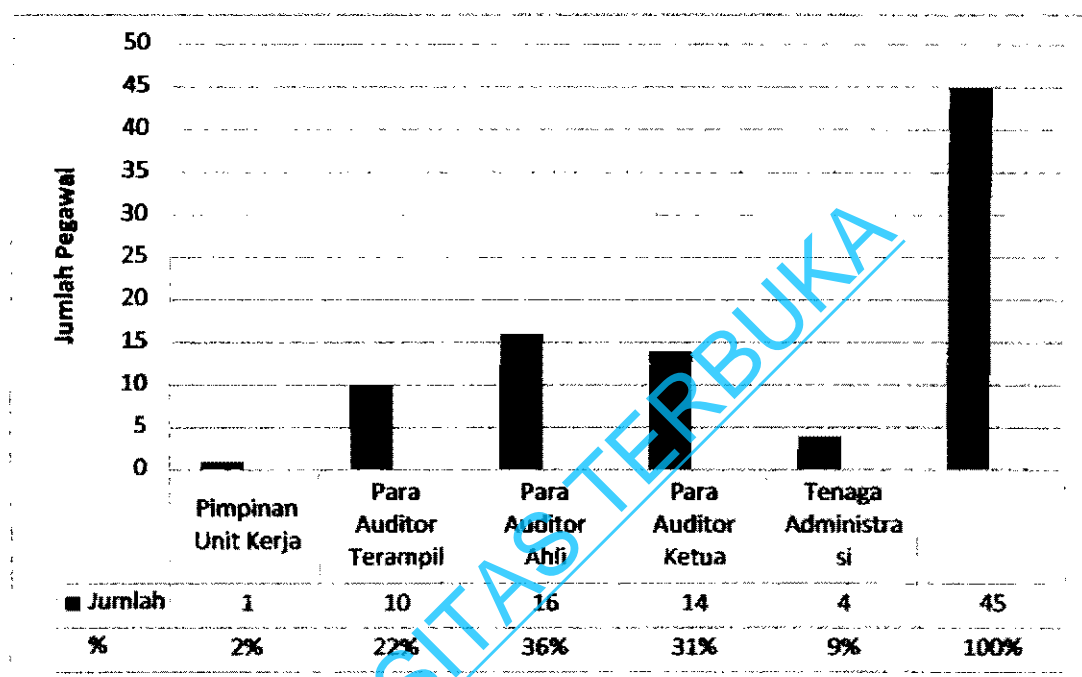
1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bertugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jumlah populasinya 45 orang.

**Tabel 3.1. Data Karyawan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pimpinan Unit Kerja	1 orang
2	Para Auditor Terampil	10 orang

3	Para Auditor Ahli	16 orang
4	Para Auditor Tingkat Ketua Tim	4 orang
5	Tenaga Administrasi	14 orang
	JUMLAH	45 orang



**Gambar. 3.1. Data Karyawan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel secara sengaja (*Purposive Sampling*) dimana peneliti telah menentukan responden dengan anggapan atau pendapat sendiri sebagai sampel penelitiannya. Penarikan sampel ini dengan cara mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti

terhadap populasi penelitian, agar sampel penelitiannya mewakili populasi (Malo, dkk : 2003)

Sampel penelitian ini diambil sebanyak 31 responden dengan pertimbangan bahwa dari seluruh pegawai inspektorat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 45 orang hanya dipilih 31 orang yang menjadi responden, yang sudah lulus sertifikasi auditor maupun yang telah mengikuti sertifikasi auditor namun belum lulus.

E. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner, yang berbentuk daftar pertanyaan yang harus di jawab oleh responden yaitu auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keseluruhan jawaban yang ditentukan tersebut diidentifikasi dalam 5 (lima) kategori yang meliputi : Sangat Setuju, Setuju, Tidak Ada Pendapat, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju menurut skala Likert (Sugiono : 2001)

Pengembangan instrumen ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

- Menyusun indikator penelitian.
- Menyusun kisi-kisi instrumen.
- Melakukan uji coba instrumen.
- Melakukan pengujian validitas dan realibilitas instrumen.

Tabel 3.2. Kisi-kisi Variabel, Dimensi, Indikator

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan	Pendidikan Pengalaman Pelatihan	1. Jenjang pendidikan formal 2. Jenjang Pendidikan non formal 3. Latar belakang pendidikan 1. Lamanya bekerja pada kantor Inspektorat Daerah 2. Pengalaman kerja dibidang pemeriksaan pada kantor Inspektorat Daerah 3. Pengalaman kerja sebagai pemeriksa pada instansi lain. 1. Berbagai pelatihan pemeriksaan yang pernah diikuti 2. Lamanya waktu pelatihan yang diikuti 3. Materi yang didapat dalam pelatihan apakah telah sesuai drngan standar audit pemerintah
2	Mutu Hasil Pemeriksaan(Y)	Prosedur Pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan • Pelaporan 	1. Penentuan ruang lingkup pemeriksaan 2. Penyusunan program kerja pemeriksaan 3. Penentuan jenis pemeriksaan 1. Penentuan sistem pengawasan 2. Pengumpulan bukti – bukti pemeriksaan 3. Pembuatan kertas kerja pemeriksaan 1. Pelaporan sesuai dengan norma pelaporan 2. Isi laporan konsisten 3. Ada rekomendasi 4. Laporan segera, tertulis dan disusun tepat waktu

Uji Persyaratan

Mengingat pengumpulan data melalui kuisioner, maka faktor kesungguhan responden menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang penting. Validitas (Kesakhihan) suatu penelitian ilmu-ilmu sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang dipergunakan, apabila alat ukurnya tidak valid dan tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian akan bias atau diragukan kebenarannya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu :

a. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesakhihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Arikunto, 2006)

Untuk memperoleh instrumen yang valid, peneliti harus bertindak hati-hati sejak awal penyusunannya. Dengan mengikuti langkah penyusunan instrumen, yakni memecah variabel menjadi sub-sub variabel dan indikator baru memuat butir-butir pertanyaannya. Peneliti perlu bertindak hati-hati, apabila cara dan isi tindakan ini sudah betul, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah boleh berharap memperoleh instrumen yang memiliki *validitas logis*. Dikatakan validitas logis karena validitas ini diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara benar

sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki (Arikunto, 2006)

Lebih lanjut Ridwan, (2008 : 132) mengemukakan :

“Metode Korelasi Spearman Rank (rho) bisa juga disebut korelasi berjenjang atau korelasi berpangkat dan ditulis dengan notasi (rs). Kegunaannya adalah untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal, mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama, mendapatkan validitas empiris (*concurrent validity*) alat pengumpul data dan mengetahui reliabilitas (keajegan) alat pengumpul data yang dimodifikasi dengan William Brown. Metode korelasi Spearman Rank tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal, populasi yang diambil sebagai sampel maksimal $5 < n < 30$ pasang, data dapat diubah dari interval menjadi ordinal.”

Langkah-langkah uji validitas adalah sebagai berikut :

Menentukan koefisien korelasi Rank Spearman dengan cara sebagai berikut

(Ridwan, 2008):

- a. Apabila item yang dihadapi berbentuk skala Ordinal, maka nilai korelasi rank Spearman pada item ke-1 adalah :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n-1)}$$

- b. Bandingkan nilai koefisien korelasi Rank Spearman (r_s) dengan nilai korelasi Rank Spearman dalam tabel (r-tabel) atau bandingkan nilai p-value (sig) pada koefisien korelasi Rank Spearman (r_s) dengan taraf nyata (α).
- c. Jika $r_s > r$ tabel atau p-value $< \alpha$, maka item tersebut valid dan dapat dijadikan sebagai indikator terhadap dimensi/variabel tersebut.
- d. Analisa tersebut digunakan menggunakan program SPSS versi 13.

b. Uji Reliabilitas

Sugiono, 2007 : 153 mengemukakan bahwa :

“Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan *interval consistency* dengan tehnik belah dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan kelompok genap dicari korelasinya”

Ditegaskan lagi Arikunto, (2006 : 170-171) menyatakan bahwa :

“Tinggi rendah reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, walaupun secara teoritis ternyata koefisien reliabilitas berkisar 0,00 – 1,00 ; akan tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,00 itu tidak pernah dicapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Disamping itu walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien reliabilitas yang positif”

Ridwan (2008 : 113 - 114) mengemukakan bahwa :

“Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat reliabilitas alat ukur salah satunya adalah dengan *interval consistency* dengan tehnik belah dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown, yaitu :

$$R = \frac{2 \times r}{1 + r} \times 100\%$$

Keterangan : R = nilai koefisien reliabilitas

r = nilai korelasi antara item belahan pertama dengan item belahan kedua

Penelitian ini akan dianalisis dengan cara membagi dua item dalam variabel tersebut, misalnya : kelompok item ganjil dengan item genap, atau membagi sama semua pernyataan berdasarkan nomor urut item pernyataan.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler di Kantor Inspektorat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data sekunder dipergunakan untuk menggambarkan keadaan umum daerah penelitian dan untuk mengetahui gambaran Inspektorat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Data primer diperoleh melalui instrumen pernyataan dan wawancara langsung dengan responden. Responden penelitian ini adalah inspektur daerah, auditor tingkat ketua tim, auditor ahli, dan auditor terampil. Selain itu diadakan pula observasi langsung di lapangan sehingga dapat mengungkap fakta yang sesungguhnya, sedangkan data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh dari Inspektorat daerah serta dokumen-dokumen, juga studi pustaka.

Data primer yaitu data utama yang digunakan untuk analisis data. Data ini dikumpulkan dengan cara penyebaran kuisioner, wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang juga diperlukan untuk analisis data. Data ini diperoleh melalui studi terhadap dokumen dan publikasi yang dianggap ada hubungannya dan penting.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu : (1) penyebaran kuesioner yang berbentuk checklist, (2) observasi dan (3) dokumentasi (Ridwan, 2008). Checklist atau daftar check adalah suatu daftar yang berisi subjek atau aspek-aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa penelitian mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap penting.

Indikator-indikator dalam penelitian ini menguraikan skala ordinal yang diukur berdasarkan teknik skala likert. Menurut Sugiono (2007 : 10) bahwa “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala Likert, maka yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dan sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain :

- | | |
|--|---|
| a) Sangat Setuju/Selalu/Sangat positif diberi skor | 5 |
| b) Setuju/Sering/Positif diberi skor | 4 |
| c) Ragu-ragu/Kadang-kadang/Negatif diberi skor | 3 |
| d) Tidak Setuju/Sangat Negatif diberi skor | 2 |
| e) Sangat Tidak Setuju diberi skor | 1 |

G. Metode Analisis Data

Ridwan (2008 : 136-152) mengemukakan bahwa :

“Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Teknik analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis

korelasi Pearson (*Product Moment*) dan dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*).”

Karena kedua metode tersebut mensyaratkan skala pengukuran pada data tersebut sekurang-kurangnya adalah interval, maka sebelum melakukan analisis korelasi Pearson dan analisis regresi perlu dilakukan konversi skala terlebih dahulu. Konversi skala yang dimaksud adalah menaikkan skala dari ordinal ke skala interval. Ridwan (2008 : 84) mengemukakan bahwa “skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama.”

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaikkan skala dari ordinal ke interval adalah dengan menggunakan metode susessive internal dari skala Likert. Langkah-langkah dalam transformasi data dengan metode susessive internal (*methode of susessive interval*) adalah sebagai berikut :

1. Jawaban kuesioner yang berupa skala ordinal dikelompokkan menurut skor jawaban masing-masing item.
2. Lakukan perhitungan untuk mendapatkan proporsi jawaban yang terdapat pada setiap kategori untuk masing-masing variabel.
3. Hitung proporsi kumulatif seluruh kategori tiap variabel.
4. Setelah diperoleh proporsi kumulatif dari seluruh kategori, kemudian dicari nilai batas dari tabel kurva normal baku yang merupakan kurve nilai absis Z.
5. Lalu dihitung nilai fungsi probabilitas ($p \alpha f$) dari fungsi normal baku.
6. Setelah diperoleh seluruh nilai batas proporsi kumulatif setiap kategori, kemudian dihitung skala value (SV) dengan rumus :

$$SV = \frac{(\text{kepadatan batas bawah}) - (\text{kepadatan batas atas})}{(\text{daerah dibawah batas atas}) - (\text{daerah dibawah batas bawah})}$$

7. Kemudian dihitung nilai konversi tiap kategori atau transformasi nilai skala (K) dengan rumus :

$$K = SV + Abs (SV \text{ min}) + 1$$

1) Teknik Analisis Data Primer

Analisa data yang dilakukan adalah (1) analisa deskriptif yang mengkaitkan dengan karakteristik responden seperti tingkat Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan, (2) menganalisa jawaban item pertanyaan dari responden, (3) analisa konversi, dan (4) analisa pengaruh pendidikan, pengalaman, dan pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data primer yang diperoleh melalui kuisisioner akan dianalisis secara statistik dengan metode analisis korelasi dan analisis regresi linear berganda.

a. Analisa Korelasi

Pola yang memperlihatkan eratnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain disebut hubungan korelasi dan analisisnya disebut analisis korelasi. Koefisien korelasi menyatakan ukuran keeratan hubungan antara satu variabel satu dengan variabel lain.

Ridwan (2008 : 136) menyatakan bahwa :

“Korelasi PPM dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna, $r = 0$ artinya tidak ada korelasi, dan $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat, sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut :

Tabel 3.3. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

No	Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
1.	0,80 - 1,00	sangat kuat
2.	0,60 - 0,799	kuat
3.	0,40 - 0,599	cukup kuat
4.	0,20 - 0,399	rendah
5.	0,00 - 0,199	sangat rendah

Ada banyak nilai-nilai koefisien korelasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penggunaan koefisien korelasi disesuaikan dengan korelasi data, yaitu dengan melihat skala pengukuran yang ada pada data tersebut.

Langkah-langkah dalam analisis korelasi adalah sebagai berikut :

1. Tetapkan hipotesis : $H_0 : \rho_{yx} = 0$ dan $H_1 : \rho_{yx} \neq 0$
2. Menurut Ridwan (2008) mengemukakan hitung koefisien korelasi Product Moment dengan rumus diatas kemudian gunakan statistik uji t sebagai berikut :

$$t = r_{yx} \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{1 - r_{yx}^2}$$

3. Bandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau p-value dengan α
4. Tolak H_0 jika t hitung $>$ t tabel dengan derajat bebas $r-2$, atau jika p-value $<$ α
5. Analisa korelasi tersebut dapat menggunakan SPSS.

b. Analisa Regresi

Ridwan (2008 : 152) menyatakan bahwa :

“Setelah dari hasil analisa regresi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, maka dilanjutkan dengan melihat besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas tertutup terhadap variabel tak bebasnya dengan analisa regresi. Analisis Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).”

Regresi berganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*).

Model umum persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Dimana :

Y = variabel terikat

x₁ = variabel bebas ke-1

x₂ = variabel bebas ke-2

x₃ = variabel bebas ke-3

b₁ = koefisien regresi untuk variabel ke-1

b₂ = koefisien regresi untuk variabel ke-2

b₃ = koefisien regresi untuk variabel ke-3

Ridwan (2008 : 152) mengemukakan bahwa “analisa regresi ganda adalah pengembangan dari analisis sederhana”. Jika k = 1, maka model regresi tersebut dinamakan regresi linear sederhana, jika k > 1, maka persamaan regresi tersebut dinamakan regresi berganda. Untuk menghitung nilai-nilai koefisien regresi dapat dilakukan dengan metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) atau dengan bantuan program statistik SPSS. Setelah koefisien regresi diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap koefisien-koefisien tersebut.

Ada dua tahap yang harus dilakukan dalam pengujian ini, yaitu :

1) Pengujian secara keseluruhan (simultan) dengan uji-F

Ridwan (2008 : 165) mengatakan bahwa :

“Anava atau Analysis of Variance (Anova) adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dapat mewakili populasi”.

Anova lebih dikenal dengan uji-F (Fisher Test).

a. Hipotesis pada pengujian ini adalah :

$$H_0 : \beta = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Artinya : semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya ada sebuah } \beta_1 \neq 0$$

Artinya : ada sebuah variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

b. Statistik uji yang akan digunakan adalah uji-F dari distribusi F-Snedecor melalui Anova menurut Ridwan (2008) sebagai berikut :

Tabel 3.4. Anova

Sumber Variasi	Derajat Bebas (db)	Jumlah Kuadrat (jk)	Rata-rata jumlah kuadrat (Rjk)	Uji-F
Regresi	K	J k reg	R J k reg	F-hitung
Sisa	n-k-1	J k sisa	R J k sisa	
Total	n-1	J total		

$F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana $F_{tabel} = F_{1-\alpha, k : n-k-1}$

Jika H_0 ditolak, maka dilanjutkan dengan pengujian secara individual (Parsial)

2) Pengujian Secara Individual (Parsial)

Hipotesis pada pengujian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$; Artinya tidak ada pengaruh variabel ke-1 terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$; Artinya ada pengaruh variabel ke-1 terhadap variabel terikat.

Ridwan, (2008) mengemukakan statistik uji yang akan digunakan adalah uji-t dari distribusi t-student

Kriteria ujinya adalah H_0 , jika $p\text{-value} < \alpha$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, dimana $t\text{-tabel} = t_{1-\alpha/2 ; n-k-1}$. Jika H_0 ditolak artinya ada pengaruh yang nyata variabel ke-1 terhadap variabel terikat.

Selain nilai-nilai koefisien regresi, habis analisis regresi juga menghasilkan nilai-nilai koefisien berganda dan nilai koefisien determinasi (R^2).

Menurut Ridwan (2008), korelasi berganda dihitung sebagai berikut :

$$R^2 = 1 - \frac{Jk \text{ sisa}}{Jk \text{ tot}} = \frac{Jk \text{ reg}}{Jk \text{ tot}}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

Jk sisa = Jumlah Kuadrat Error

Jk tot = Jumlah Kuadrat Total

Analisis tersebut dapat digunakan program SPSS

2. Tehnik Analisa Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan tehnik kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder (kuantitatif). Pendekatan data sekunder dimaksudkan supaya analisis data kuantitatif menjadi lebih komprehensif.

Analisa data sekunder dilakukan melalui analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara analisis non statistik yang digunakan untuk analisis data-data yang berupa tabel angka-angka yang tersedia dengan membaca, melakukan uraian dan penafsiran, dalam hal ini adalah data mengenai keadaan umum lokasi penelitian.

3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.

H_0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

H_1 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

H_0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

H_1 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

Ho : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

H1 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengalaman, dan pelatihan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.

Ho : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengalaman, dan pelatihan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

H1 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengalaman, dan pelatihan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI BANGKA BELITUNG

Dalam era otonomi dan reformasi seperti sekarang tentunya kita mengharapkan adanya kemampuan aparat suatu lembaga pengawasan dalam mendukung cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta dapat menjadi katalisator mendukung upaya pemberantasan praktik KKN. Dengan mempertimbang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan, serta mengacu kepada strategi pembangunan daerah provinsi, visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007 – 2012, maka Inspektorat menetapkan visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

VISI :

“Terdepan dalam mengawal jalannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pangkatan profesionalisme Aparatur Pengawasan guna menciptakan “*Good Governance dan Clean Government*”.

MISI :

1. Meningkatkan peran pengawasan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengawasan.
3. Memperkuat kelembagaan pengawasan.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas kinerja, efektif dan efisien.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

a. Tujuan

1. Meningkatkan peran pemeriksaan, pengusutan, dan advokasi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan
3. Meningkatkan peran penilaian dan evaluasi
4. Percepatan penyelesaian/penelaahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan pengawasan yang efektif dan efisien
6. Memantapkan kinerja pengawasan
7. Meningkatkan sumber daya manusia
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan

b. Sasaran

1. Terciptanya mekanisme pengawasan serta menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran, hambatan, kerugian negara/daerah dan kelemahan-kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Tersajinya informasi mengenai adanya temuan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Terbinanya aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bersih, bersih dari KKN di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
4. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas tenaga aparatur pengawasan yang profesional sesuai klasifikasi yang ditetapkan sebagai auditor yang handal
5. Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan yang mampu menunjang kebijakan KDH
6. Terciptanya Aparatur Pengawasan yang mempunyai kedisiplinan tinggi
7. Memantapkan sistem perencanaan, evaluasi, monitoring serta pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan
8. Terpenuhinya pelayanan publik melalui administrasi perkantoran
9. Terpenuhinya kebutuhan minimum sarana dan prasarana pengawasan

STRATEGI PENYELENGGARAAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategik dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
 - e. Inventarisasi temuan pengawasan
 - f. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - g. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - h. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - i. Penyelesaian TPTRG oleh Majelis TPTGR dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - b. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d. Penyusunan pelaporan akhir tahun
 - e. Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kerja Tahunan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian visi dan misi inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Kebijakan memperkuat pranata dan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), diprioritaskan pada upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendali kebijakan KDH.
2. Kebijakan pelaksana pengawasan dan pengendalian aparatur pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan serta pengintensifan peningkatan pengaduan masyarakat.

3. Kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berasaskan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada tingkat pengembangan sistem pelaporan laporan kerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kemampuan aparat inspektorat daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu membentuk pemerintahan yang bersih. Peran inspektorat daerah dapat mempengaruhi pemberantasan KKN yang terjadi pada instansi pemerintah. Tugas inspektorat daerah bukan mencari-cari kesalahan, tetapi memberi koreksi secara arif dan bijak terhadap hal-hal yang dianggap kurang untuk diperbaiki. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis yaitu menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan, disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan objek pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan dalam menggunakan sumber daya dan dana sehingga seluruh kegiatan dan organisasi dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Objek pemeriksaan inspektorat propinsi Bangka Belitung sebanyak 47 objek yaitu :

**Tabel 4.1. Data Objek Pemeriksa Inspektorat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Objek Pemeriksaan
1.	Sekretariat Propinsi	a. Biro Pemerintahan b. Biro Hukum c. Biro Organisasi d. Biro Pembangunan

		<ul style="list-style-type: none"> e. Biro Perekonomian f. Biro Kesejahteraan Rakyat g. Biro Umum dan Perlengkapan
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat DPRD
3..	Kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Daerah Propinsi b. Kantor Perwakilan di Jakarta c. Kantor Satuan Pol. PP
4	Dinas-dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Kelautan dan Perikanan c. Dinas Kesehatan d. Dinas Kehutanan e. Dinas Kesejahteraan sosial f. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah g. Dinas Komunikasi dan Informatika h. Dinas Pekerjaan Umum i. Dinas Pemuda dan Olahraga j. Dinas Pendidikan k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan l. Dinas Perhubungan dan Energi m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Badan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Kepegawaian Daerah b. Badan Kesbangpol dan Linmas c. Badan Ketahanan Pangan d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah e. Badan Lingkungan Daerah f. Badan Pendidikan dan Pelatihan g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
6	Lembaga Teknis/Perusahaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Jiwa Daerah b. UPT Dispenda Pangkal Pinang c. UPT Dispenda Bangka d. UPT Dispenda Bangka Barat e. UPT Dispenda Bangka Tengah f. UPT Dispenda Bangka Selatan g. UPT Dispenda Belitung h. UPT Dispenda Belitung Timur UPT Pertanian Pusat
7.	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Narkotika Propinsi b. Sekretariat Kopri Propinsi

8.	Kabupaten/Kota Pangkal Pinang	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.	Bangka Barat	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. Badan Kesbangpol d. Badan Pemberdayaan Perempuan
10.	Bangka Selatan	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah d. Bagian Tata Pemerintahan
11.	Bangka Tengah	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. Dinas Pendidikan d. Kantor Arsip
12.	Bangka	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. BAPPEDA d. Kantor Satuan Pol.PP
13.	Belitung	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. BAPPEDA dan Penanaman Modal d. Tata Bagian Pemerintahan Setda
14.	Belitung Timur	a. Sekretariat DPRD b. Inspektorat c. BAPPEDA dan Penanaman Modal d. Bagian Tata Pemerintahan Setda

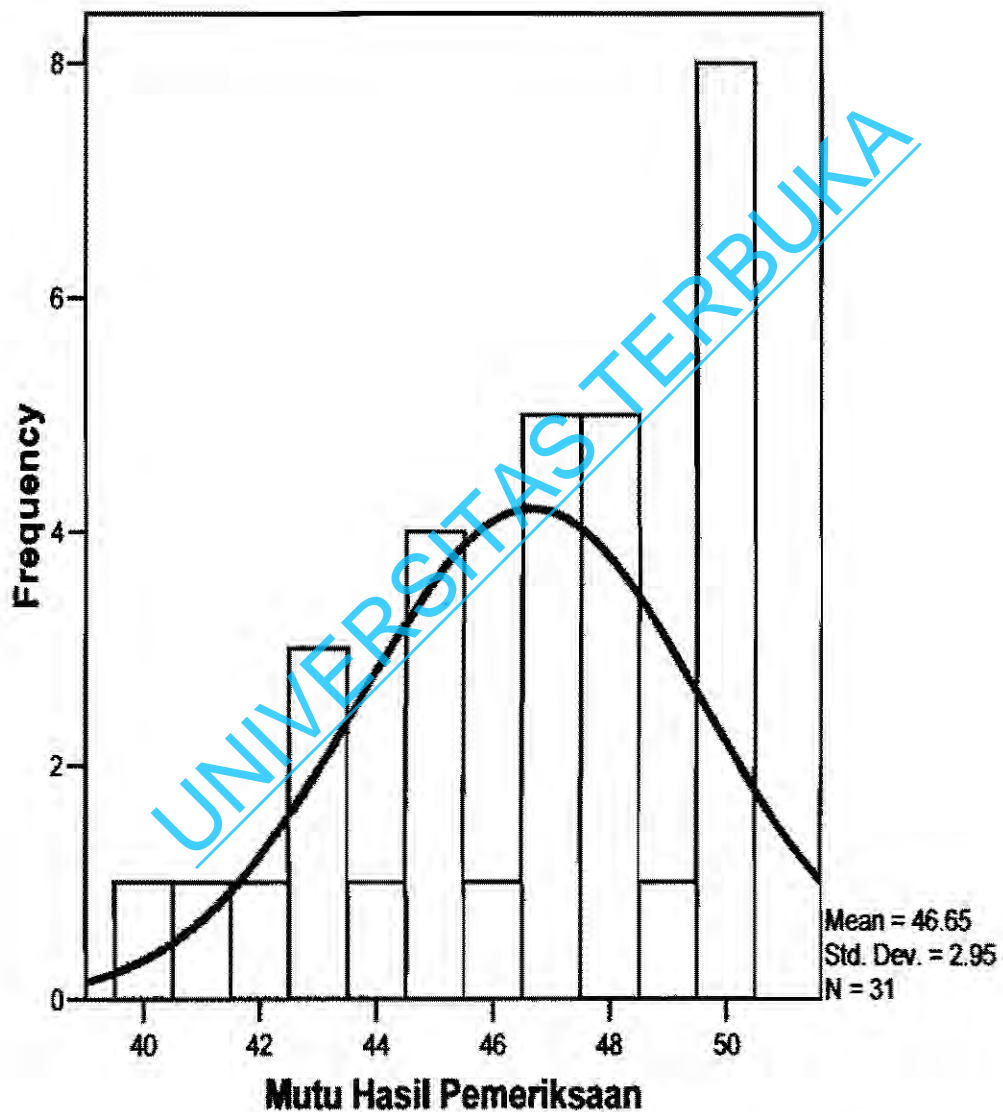
B. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

1. Deskripsi Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 10 butir pertanyaan, distribusi skor empiris untuk pertanyaan Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyebar antara skor terendah 40 sampai skor tertinggi 50. Perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan rata-rata sebesar 46.65 dengan *standard error* 0.230, median sebesar 47.00, modus 50,

standar deviasi sebesar 2,950. Distribusi frekuensi data dapat dilihat pada lampiran.1.

Distribusi frekuensi data variable Mutu Hasil Pemeriksaan tersebut, secara visual dapat dilihat dalam bentuk histogram sebagai berikut:



Gambar. 4.1. Histogram mutu hasil pemeriksaan

Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari variabel Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dianalisis nilai rata-rata setiap indikatornya, sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Nilai Rata-rata Indikator Mutu Hasil Pemeriksaan

Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean
Penentuan Ruang Lingkup pemeriksaan	31	4	5	4,548
Program Kerja Pemeriksaan (PKP)	31	3	5	4,483
Jenis Pemeriksaan	31	3	4	4,612
Efektivitas Sistem Pengawasan	31	3	5	4,516
Bukti-Bukti Pengawasan	31	4	5	4,741
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	31	3	5	4,838
Kesesuaian dengan Norma Peraporan	31	4	5	4,709
Konsistensi	31	3	5	4,774
Rekomendasi	31	4	5	4,741
Tertulis dan Segera serta Tepat Waktu(Paling lambat 15 hari kerja setelah melaksanakan tugas pemeriksaan)	31	3	5	4,674

Dari data analisis deskriptif variabel Mutu Hasil Pemeriksaan, indikator-indikator Mutu Hasil Pemeriksaan dapat dikategorikan ke dalam interval-interval sebagai berikut:

- a. 0,0 -1,0 termasuk kategori tidak baik
- b. 1,0 – 2,0 termasuk ketagori kurang baik
- c. 2,0 – 3,0 termasuk kategori cukup baik
- d. 3,0 – 4,0 termasuk kategori baik
- e. 4,0 – 5,0 termasuk kategori sangat baik

Berdasarkan data analisis deskriptif variabel Mutu hasil pemeriksaan regular diatas, semua indikator telah mencapai kategori sangat baik (berada pada interval (4,0 – 5,0) yaitu: penentuan ruang lingkup pemeriksaan, program kerja pemeriksaan (PKP), jenis pemeriksaan, efektifitas system pemeriksaan, bukti-bukti pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan (KKP), kesesuaian dengan norma pelaporan, konsistensi, rekomendasi, tertulis dan segera serta tepat waktu.

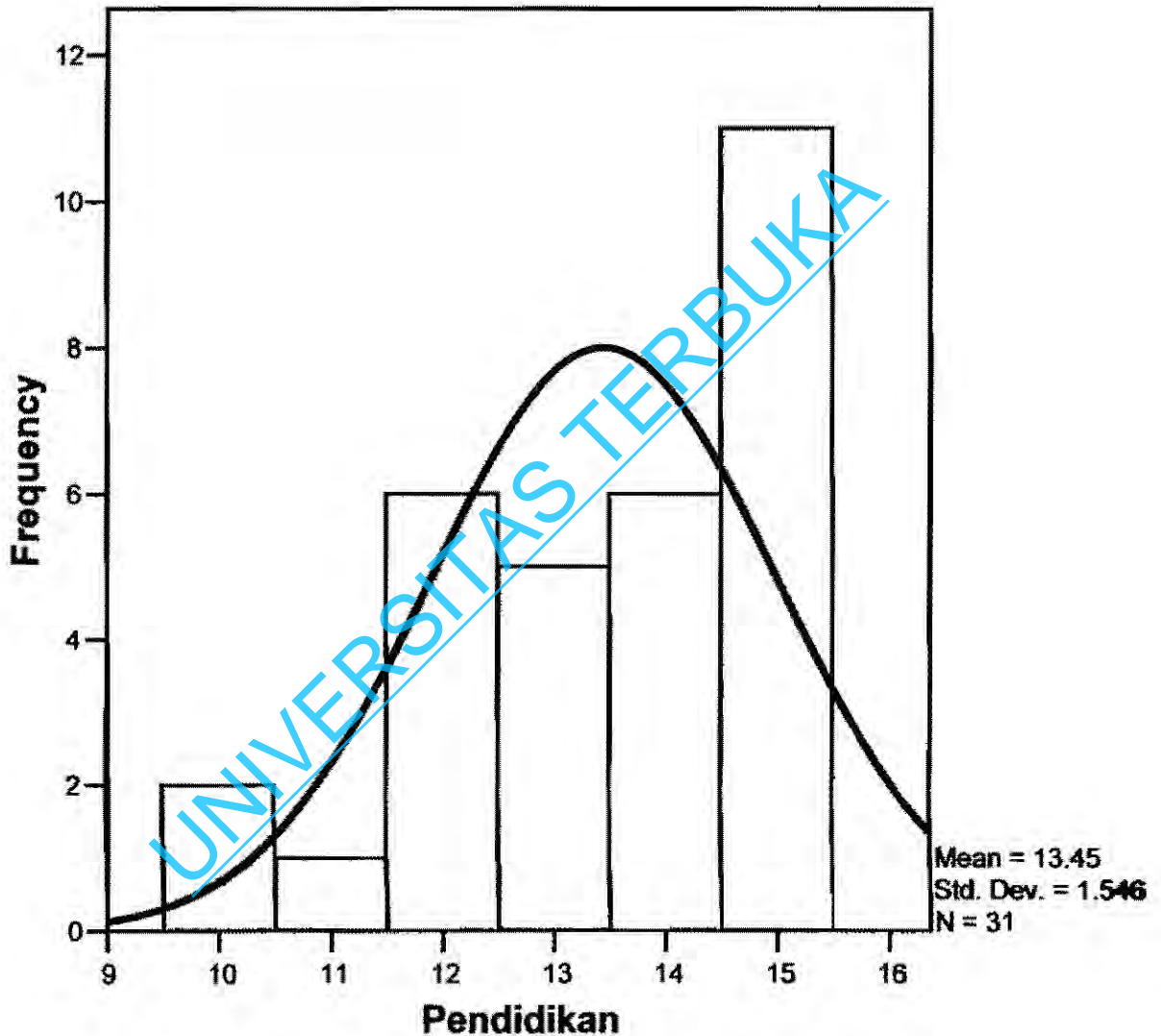
Sesuai analisis deskriptif variabel Mutu Hasil pemeriksaan regular diatas, tidak ada indikator yang berada pada kategori tidak baik, kurang baik dan cukup baik, sehingga dapat dikatakan seluruh indikator Mutu hasil Pemeriksaan Reguler sudah optimal.

2. Deskripsi Dimensi Pendidikan Aparat Pengawas (X_1)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 3 butir pertanyaan, distribusi skor empiric untuk pertanyaan Pendidikan Aparat Pengawas ini menyebar antara skor terendah 10 sampai skor tertinggi 15. Perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan rata-rata sebesar 13,45 dengan *standard error* 0,278 median sebesar

14.00, modus 15, standar deviasi sebesar 1,546. Distribusi frekuensi data dapat dilihat pada lampiran.2.

Distribusi frekuensi data dimensi Pendidikan Aparat Pengawas tersebut, secara visual dapat dilihat dalam bentuk histogram sebagai berikut:



Gambar. 4.2. Histogram Pendidikan Aparat Pengawas

Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari dimensi Pendidikan aparat pengawas perlu dianalisis nilai rata-rata setiap indikatornya, sebagai berikut:

Tabel. 4.3. Nilai Rata-rata Indikator Pendidikan

Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean
Jenjang pendidikan formal	31	2	5	4,483
Pendidikan non formal	31	4	5	4,612
Latar belakang pendidikan	31	2	5	4,354

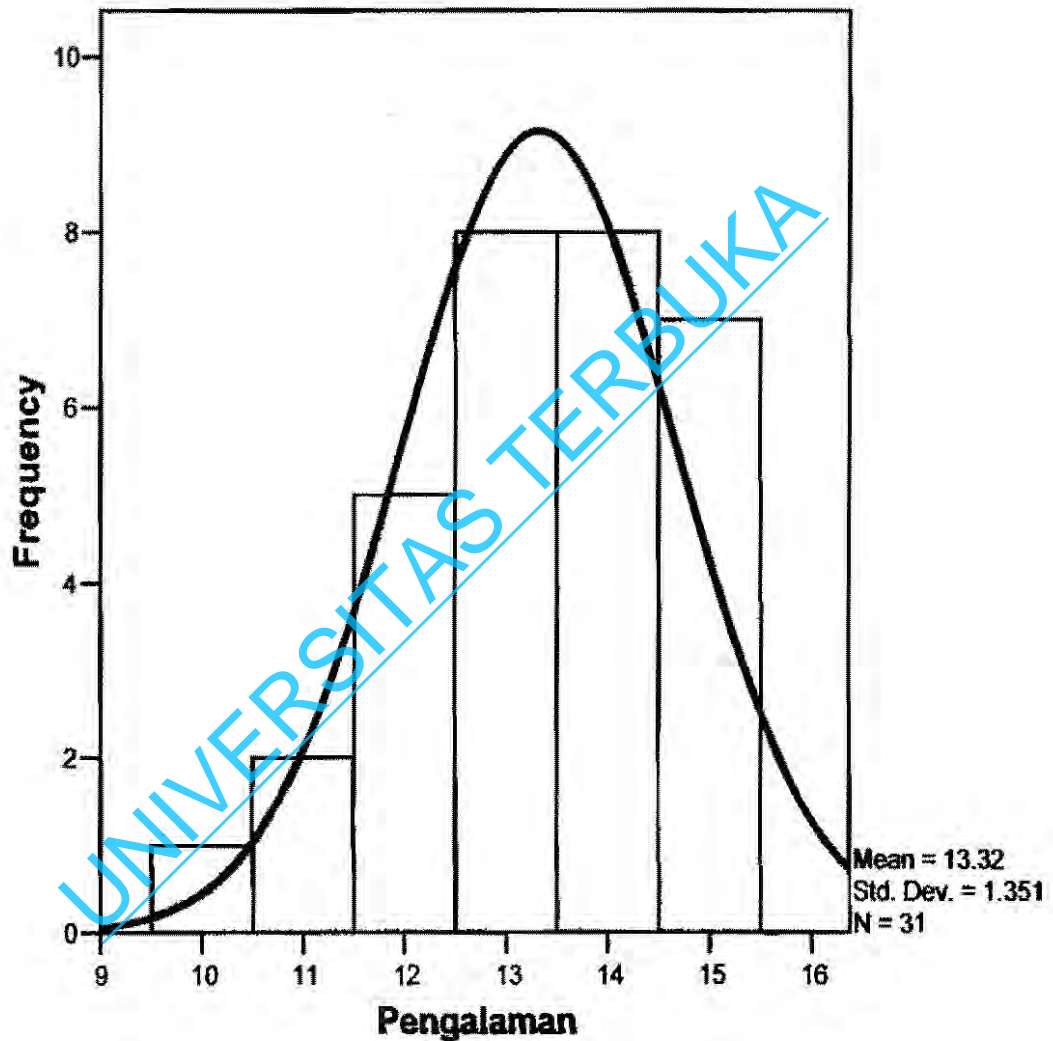
Berdasarkan data analisis deskriptif variabel pendidikan aparat pengawas diatas, semua indikator berada pada kategori sangat baik karena berada pada interval 4,0 – 5,0, yaitu: jenjang pendidikan formal, pendidikan non formal dan latar belakang pendidikan.

Sesuai analisis deskriptif variabel Pendidikan aparat pengawas diatas, tidak ada indikator yang berada pada kategori tidak baik dan kurang baik, sehingga Pendidikan aparat pengawas telah optimal.

3. Deskripsi Dimensi Pengalaman Aparat Pengawas (X_2)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 3 butir pertanyaan, distribusi skor empiris untuk pertanyaan Pengalaman aparat pengawas ini menyebar antara skor terendah 10 sampai skor tertinggi 15. Perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan rata-rata sebesar 13.32 dengan *standard error* 0,243, median

sebesar 13.00, modus 13, standar deviasi sebesar 1,351. Distribusi frekuensi data dapat dilihat pada lampiran.3. Distribusi frekuensi data variabel Pengalaman aparat pengawas tersebut, secara visual dapat dilihat dalam bentuk histogram sebagai berikut:



Gambar. 4.3. Histogram Pengalaman Aparat Pengawas

Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari dimensi Pengalaman aparat pengawas ini perlu dianalisis nilai rata-rata setiap indikatornya, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Nilai Rata-rata Indikator Pengalaman aparat pengawas

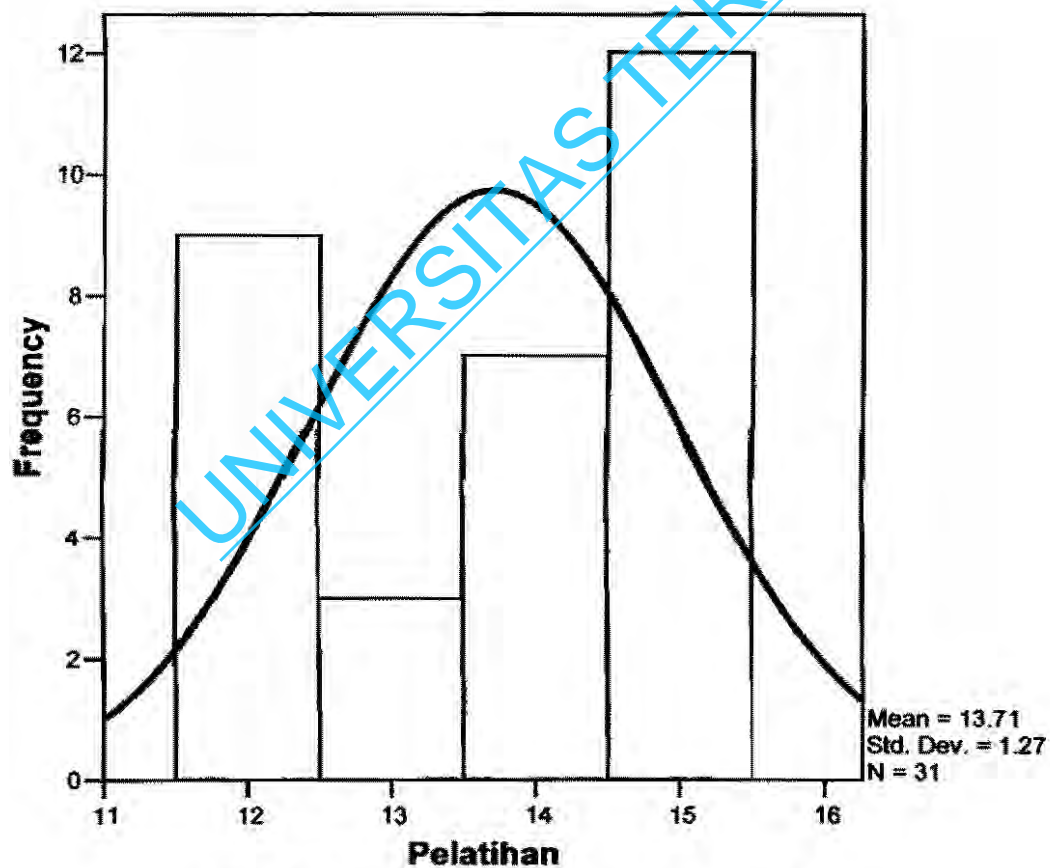
Indikator	N	Minimum	Maximum	Mean
Lamanya bekerja pada inspektorat daerah	31	4	5	4,508
Pengalaman kerja dibidang audit inspektorat daerah	31	4	5	4,580
Pengalaman kerja sebagai audit di tempat lain	31	4	5	4,548

Berdasarkan data analisis deskriptif variabel Pengalaman aparat pengawas di atas, semua indikator terkategori telah sangat baik karena berada pada interval 4,0 – 5,0, yaitu: lamanya bekerja pada inspektorat daerah, pengalaman kerja dibidang audit di Inspektorat daerah dan pengalaman kerja sebagai audit di tempat lain.

Sesuai analisis deskriptif variabel Pengalaman aparat pengawas diatas, tidak ada indikator yang berada pada kategori tidak baik dan kurang baik, Oleh karena itu pengalaman aparat pengawas telah optimal.

4. Deskripsi Dimensi Pelatihan Aparat Pengawas (X3)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 3 butir pertanyaan, distribusi skorempiric untuk pertanyaan Pelatihan aparat pengawas ini menyebar antara skor terendah 12 sampai skor tertinggi 15. Perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan rata-rata sebesar 13.71 dengan *standard error* 0,228, median sebesar 14.00, modus 15, standar deviasi sebesar 1,270. Distribusi frekuensi data dapat dilihat pada lampiran.4.Distribusi frekuensi data variabel Pelatihan aparat pengawas tersebut, secara visual dapat dilihat dalam bentuk histogram sebagai berikut:



Gambar. 4.4. Histogram Pelatihan Aparat Pengawas

Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari dimensi Pelatihan aparat pengawas ini perlu dianalisis nilai rata-rata setiap indikatornya, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Nilai Rata-rata Indikator Pelatihan aparat pengawas

Indikator	N	Minimum	Maximum	Rata-rata
Berbagai pelatihan audit yang pernah diikuti	31	4	5	4,709
Lamanya waktu pelatihan	31	4	5	4,129
Materi pelatihan audit yang diikuti telah sesuai dengan standar audit pemerintah	31	4	5	4,483

Berdasarkan data analisis deskriptif variabel Pelatihan aparat pengawas di atas, semua indikator terkategori juga telah sangat baik karena berada pada interval 4,0 – 5,0, yaitu: berbagai pelatihan audit yang pernah diikuti, lamanya waktu pelatihan, dan materi pelatihan audit yang diikuti telah sesuai dengan standar audit pemerintah.

Sesuai analisis deskriptif variabel pelatihan aparat pengawas di atas, tidak ada indikator yang berada pada kategori tidak baik dan kurang baik, Oleh karena itu pelatihan aparat pengawas juga telah optimal

C. ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL

1. Uji Persyaratan

Dengan mempertimbangkan bahwa data penelitian diolah dengan statistik parametris, maka perlu dilakukan uji persyaratan analisis sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data uji validitas, ternyata koefisien korelasi semua butir skor total untuk instrument variabel Mutu hasil pemeriksaan regular yang berjumlah 10 butir pertanyaan lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka seluruh data variabel Mutu hasil pemeriksaan regular dinyatakan valid. Dan koefisien korelasi semua butir skor total untuk dimensi Pendidikan aparat pengawas yang berjumlah 3 butir pertanyaan lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka seluruh data dimensi Pendidikan aparat pengawas dinyatakan valid. Begitu juga dengan koefisien korelasi semua butir skor total untuk instrument dimensi Pengalaman aparat pengawas yang berjumlah 3 butir pertanyaan lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka seluruh data dimensi Pengalaman aparat pengawas dinyatakan valid. Serta koefisien korelasi semua butir skor total untuk dimensi Pelatihan aparat pengawas yang berjumlah 3 butir pertanyaan lebih besar dari $\alpha = 0.05$, maka seluruh data dimensi Pelatihan aparat pengawas juga dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrument dengan menggunakan program SPSS, terlampir.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* dalam program SPSS versi 1.3, didapat variabel Mutu

hasil pemeriksaan regular sebesar 0,834, Pendidikan aparat pengawas 0,799, Pengalaman pengawas 0,794 dan Pelatihan pengawas 0,760. Karena nilai keempat variabel lebih besar dari t tabel = 0,532, maka seluruh data variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen semua variabel dengan menggunakan program SPSS, terlampir.

2. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain dilakukan dengan cara melakukan analisis korelasi Pearson (*Product Moment*).

- a. Hitung nilai koefisien Pearson (*Product Moment*).
- b. Hitung statistik uji-t dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r_{yx} \sqrt{n-2}}{1 - r^2_{yx}}$$

- c. Tentukan nilai t-tabel dengan derajat bebas (n-3)
- d. Bandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau p-value dengan taraf nyata (α)
- e. Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel atau p-value $<$ α maka H_0 ditolak

Analisis tersebut bisa menggunakan langkah-langkah diatas atau bisa juga menggunakan program SPSS versi 13. Hasil penggunaan

program SPSS versi 17 diperoleh nilai koefisien korelasi antar variabel seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6. Hasil Analisis Korelasi $X_1 - Y$

		Pendidikan	Pengalaman	Pelatihan	Mutu Hasil Pemeriksaan
Pendidikan	Pearson Correlation	1	.527(**)	.598(**)	.453(*)
	Sig. (2-tailed)	.	.002	.000	.010
	N	31	31	31	31
Pengalaman	Pearson Correlation	.527(**)	1	.639(**)	.434(*)
	Sig. (2-tailed)	.002	.	.000	.015
	N	31	31	31	31
Pelatihan	Pearson Correlation	.598(**)	.639(**)	1	.531(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.002
	N	31	31	31	31
Mutu Hasil Pemeriksaan	Pearson Correlation	.453(*)	.434(*)	.531(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.015	.002	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa pada baris pertama (*Pearson Correlation*) menunjukkan besarnya nilai koefisien korelasi (r) antara satu variabel dengan variabel lainnya, pada baris kedua (*Sig.*) menunjukkan nilai p-value yang berarti peluang kesalahan terjadi dan baris ke-3 (*N*) menunjukkan ukuran sampel dalam hal ini 31 orang.

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) antara variabel pendidikan dengan mutu hasil pemeriksaan (Y) sebesar 0,453, ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dengan mutu hasil pemeriksaan reguler cukup kuat karena berada dalam interval 0,40-0,099 artinya makin tinggi tingkat pendidikan aparat pengawasan, semakin bermutu laporan hasil pemeriksaan.

Tabel 4.7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi $X_1 - Y$

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453(a)	.205	.178	2.675

a Predictors: (Constant), Pendidikan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa R adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, R square disebut koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa variasi variabel Y disebabkan oleh variabel X. Adjusted R Square menunjukkan nilai R^2 yang disesuaikan. Dari analisis diatas, diketahui bahwa korelasi ganda (R) adalah 0,453 dan R-square adalah 0,205 dengan demikian dinyatakan bahwa 20,5% variasi yang terjadi terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler (Y) disebabkan oleh variabel pendidikan aparat pengawasan (X_1) dan sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian.

Tabel 4.8. Hasil Analisis Korelasi X₂ – Y

Correlations

		Pendidikan	Pengalaman	Pelatihan	Mutu Hasil Pemeriksaan
Pendidikan	Pearson Correlation	1	.527(**)	.598(**)	.453(*)
	Sig. (2-tailed)	.	.002	.000	.010
	N	31	31	31	31
Pengalaman	Pearson Correlation	.527(**)	1	.639(**)	.434(*)
	Sig. (2-tailed)	.002	.	.000	.015
	N	31	31	31	31
Pelatihan	Pearson Correlation	.598(**)	.639(**)	1	.531(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.002
	N	31	31	31	31
Mutu Hasil Pemeriksaan	Pearson Correlation	.453(*)	.434(*)	.531(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.015	.002	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Perhitungan nilai koefisien korelasi antar variabel Pengalaman (X_2) dengan mutu hasil pemeriksaan reguler (Y) adalah sebesar 0,434, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pengalaman dengan mutu hasil pemeriksaan reguler cukup kuat karena berada dalam interval 0,40-0,599, koefisien korelasi positif artinya semakin banyak pengalaman aparat pengawasan dalam melakukan pemeriksaan, maka semakin bermutu laporan hasil pemeriksaan yang disusun.

Tabel 4.9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi $X_2 - Y$

Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.434(a)	.189	.161	2.703

a Predictors: (Constant), pengalaman

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa R adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antar variabel X dengan variabel Y, R Square disebut koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa variabel (Y) disebabkan oleh variabel (X) Adjusted R Square merupakan nilai R^2 yang disesuaikan.

Dari analisis model Summary diketahui bahwa korelasi ganda (R) adalah 0,434 dan R Square adalah 0,189. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 18,9% variasi yang terjadi terhadap mutu hasil pemeriksaan (Y) disebabkan

variasi Pengalaman aparat pengawasan (X_2) dan sisanya sebesar 81,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 4.10. Hasil Analisis Korelasi $X_3 - Y$

Correlations

		Pendidikan	Pengalaman	Pelatihan	Mutu Hasil Pemeriksaan
Pendidikan	Pearson Correlation	1	.527(**)	.598(**)	.453(*)
	Sig. (2-tailed)	.	.002	.000	.010
	N	31	31	31	31
Pengalaman	Pearson Correlation	.527(**)	1	.639(**)	.434(*)
	Sig. (2-tailed)	.002	.	.000	.015
	N	31	31	31	31
Pelatihan	Pearson Correlation	.598(**)	.639(**)	1	.531(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.002
	N	31	31	31	31
Mutu Hasil Pemeriksaan	Pearson Correlation	.453(*)	.434(*)	.531(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.015	.002	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Perhitungan koefisien korelasi antara variabel Pelatihan (X_3) dengan mutu hasil pemeriksaan reguler (Y) menunjukkan angka 0,531, artinya hubungan antara pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat pengawasan dengan mutu hasil pemeriksaan reguler cukup kuat karena berada pada interval 0,40-0,599. Hal ini menunjukkan hubungan antara pelatihan dengan mutu hasil pemeriksaan reguler cukup erat dan koefisien korelasi positif artinya semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh Aparat pengawasan maka semakin mudah dalam menyusun suatu laporan hasil pemeriksaan.

Tabel 4.11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi X_3 -Y

Model Summary(b)				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531(a)	.282	.258	2.542

a Predictors: (Constant), Pelatihan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa R adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y), R Square disebut koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa variasi variabel (Y) disebabkan oleh variabel (X).

Tabel 4.12. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Model summary

Model	R	R square	Adjusted R square	Std.Error of the estimate
1	.564	.318	.242	2.568

a. Predictors: (constant), variabel pelatihan, variabel pendidikan, variable pengalaman

Tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (r^2), koefisien korelasi (R) sebesar 0,564 dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel-variabel independen yaitu variabel pendidikan, pengalaman dan pelatihan bersifat positif, artinya apabila Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan aparat pengawasan ditingkatkan, maka akan meningkat pula mutu hasil pemeriksaan reguler. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,318 artinya bahwa mutu hasil pemeriksaan 31,8% dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh aparat pengawasan, sedangkan 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan *entre method*. Semua variabel dimasukkan secara serentak tanpa melewati kriteria tertentu, kemudian pengeluaran variabel dan metode berdasarkan pertimbangan peneliti, baik secara substansi atau dari aspek statistik (p-value). Analisis yang akan digunakan untuk melihat pengaruh 3 variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas adalah analisis regresi linear berganda.

Pada analisis regresi dikenal variabel bebas (*independent*) dan variabel tak bebas (*dependent*). Pada penelitian ini sebagai variabel bebas adalah Pendidikan (X_1), Pengalaman (X_2), dan Pelatihan (X_3), sedangkan variabel tak bebasnya adalah Kinerja Pegawai (Y). Seperti pada analisis korelasi, pada analisis regresi juga mensyaratkan skala pengukurannya sekurang-kurangnya interval, sehingga data pada skala ordinal harus dinaikkan menjadi skala interval terlebih dahulu.

Sebelum diambil suatu kesimpulan maka koefisien regresi diatas perlu dilakukan pengujian baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individu (Parsial).

a). Pengujian secara simultan

Untuk mengetahui perhitungan secara simultan dilakukan dengan analisis ragam (ANOVA – Analysis Of Variance) menggunakan statistik uji-F, yaitu digunakan untuk menguji apabila model persamaan regresi $Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$ yang diajukan akan diterima atau tidak. Caranya dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka model persamaan dapat diterima. Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS untuk analisis ragam dari hasil pengujian diperoleh hasil seperti pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.13. Anova Pengujian secara Simultan

Anova^b

Model	Sum of squares	Df	mean squars	F	sig
1 regression	83.065	3	27.688	4,199	.015
Residual	178.031	27	6.594		

Total	261.097	30			
-------	---------	----	--	--	--

**** Predictors:** (constant), variable pelatihan, variabel pendidikan, variabel pengalaman.

***Dependen variable:** variabel mutu pemeriksaan

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk kolom (model) menunjukkan sumber variasi, kolom Sum of Square menunjukkan jumlah kuadrat (Jk), kolom (df) menunjukkan derajat bebas (db), kolom mean square menunjukkan rata-rata jumlah kuadrat (RJK) yang diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi kuadrat bebas, kolom F menunjukkan nilai F-hitung dan kolom Sig. menunjukkan nilai p-value atau peluang kesalahan terjadi. Untuk membuat kesimpulan dapat menggunakan nilai F-hitung yang dibandingkan dengan F-tabel. Berdasarkan tabel diperoleh nilai F-hitung sebesar 4,199, sedangkan F-tabel pada taraf 5% dengan $db_1 = 3$, $db_2 = 27$ adalah 2,98, karena F-hitung > F-tabel maka H_0 ditolak, artinya pada taraf nyata sebesar 5% dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.

b). Pengujian Secara Parsial

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengalaman, dan pelatihan aparat pengawasan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh nyata terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat, maka digunakan program SPSS versi 17 dan diperoleh koefisien regresi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.14. Koefisien Pengujian secara Parsial

Coefficients (a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.143	5.489		5.127	.000
	Variabel pendidikan	.352	.389	.148	.904	.374
	Variabel pengalaman	.266	.494	.115	.539	.594
	Variabel pelatihan	.759	.492	.348	1.543	.135

a. Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Kolom B menunjukkan nilai-nilai koefisien regresi untuk konstanta dan masing-masing variabel bebas (X_1, X_2, X_3). Kolom Standard Error menunjukkan nilai kesalahan baku untuk parameter koefisien regresi, kolom Beta menunjukkan besarnya koefisien regresi yang dibakukan atau menunjukkan koefisien jalur, kolom t menunjukkan nilai t-hitung untuk masing-masing parameter koefisien regresi dan kolom Sig. menunjukkan besarnya peluang kesalahan yang terjadi (nilai-nilai yang akan dibandingkan dengan α). Dari tabel tersebut diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 28.143 + 0,352 X_1 + 0,266 X_2 + 0,759 X_3$$

Perhitungan yang dilakukan dengan pengujian secara parsial dengan bantuan program SPSS versi 17. Pada taraf nyata 5 % dengan jumlah sampel 31 orang responden, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,750. Dari tabel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai t-hitung untuk variabel pendidikan sebesar 0,904 dengan p-value < 5 %, maka H_0 ditolak artinya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % dapat dinyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler. Berarti hipotesis yang diajukan terbukti atau hipotesis diterima.
- 2) Nilai t-hitung untuk variabel pengalaman yang dimiliki aparat pengawasan sebesar 0,539 dengan p-value sebesar 0,594 sedangkan t-tabel sebesar 2,705. Karena t-hitung < t-tabel atau p-value > 5 % maka H_0 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95 % maka dapat dinyatakan bahwa variabel pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengawasan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
- 3) Nilai t-hitung untuk variabel pelatihan yang pernah dimiliki oleh aparat pengawasan sebesar 1,543 dengan p-value 0,135 sedangkan t-tabel sebesar 2,705. Karena t-hitung < t-tabel atau p-value > 5 % maka H_0 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95 % dapat dinyatakan bahwa variabel pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat pengawasan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Hasil pengujian secara simultan maupun secara parsial menunjukkan signifikan sehingga metode persamaan regresinya adalah :

$$Y = 28.143 + 0,352 X_1 + 0,266 X_2 + 0,759 X_3$$

Model persamaan regresi diatas ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jika tidak ada pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki aparat pengawasan serta pelatihan yang pernah diikuti maka mutu hasil pemeriksaan reguler rata-rata 28.143 satuan.
- 2) Jika variabel pendidikan dan pengalaman dianggap tidak ada, maka pelatihan akan meningkatkan mutu hasil pemeriksaan sebesar 0,759 satuan.
- 3) Jika variabel pendidikan dan pelatihan dianggap tidak ada, maka pengalaman kerja akan meningkatkan mutu hasil pemeriksaan reguler sebesar 0,266 satuan.
- 4) Jika variabel pengalaman dan pelatihan dianggap tidak ada, maka peningkatan pendidikan akan meningkatkan mutu hasil pemeriksaan reguler sebesar 0,352 satuan.
- 5) Berdasarkan koefisien determinasi (R^2), maka besarnya pengaruh pendidikan, pengalaman, dan pelatihan terhadap mutu hasil pemeriksaan

reguler pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 31,8 %.

- 6) Faktor yang tidak dapat diamati dan berpengaruh terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 68,2 %.

D. UJI HIPOTESIS STATISTIK

Untuk menguji hipotesis pertama yang berbunyi “Terdapat pengaruh pendidikan, pengalaman, dan pelatihan aparat pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler dan hipotesis kedua yang berbunyi “Semakin tinggi pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan maka semakin baik mutu hasil pemeriksaan reguler”, digunakan analisis korelasi dan analisis regresi linear berganda.

1. Hubungan Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawas (X) Terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler (Y)

Berdasarkan analisis statistik dengan program SPSS versi 1.3, diketahui bahwa koefisien korelasi untuk hubungan variabel Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat karena berada pada interval 0,40 – 0,70. Koefisien korelasi untuk hubungan pendidikan aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler diperoleh sebesar 0,453, Koefisien korelasi untuk hubungan pengalaman aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler

diperoleh sebesar 0,434 dan Koefisien korelasi untuk hubungan pelatihan aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan regular diperoleh sebesar 0,531. Maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan regular, kedua variabel berjalan seiring, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan maka makin bermutu hasil pemeriksaan regular. Maka hipotesis pertama yang berbunyi :

“Terdapat pengaruh Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Regular dapat diterima.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan regular.

2. Pengaruh Antara Pendidikan, Pengalaman, dan Pelatihan Aparat Pengawas (X) Terhadap Mutu Hasil Pemeriksaan Regular (Y)

Berdasarkan analisis statistik dengan program SPSS, diketahui bahwa Signifikansi t-hitung untuk variabel Pendidikan Aparat Pengawas (X_1) adalah 0,010, Pengalaman Aparat Pengawas (X_2) adalah 0,015 dan Pelatihan Aparat Pengawas (X_3) adalah 0,002

Ketentuan pengujian hipotesis yaitu jika t-signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ maka Hipotesis dapat diterima.

Karena t-signifikansi ketiga dimensi dari variabel pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan $< \alpha = 0,05$ maka hipotesis yang berbunyi :

“Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan aparat pengawasan maka semakin baik mutu hasil pemeriksaan reguler”, dapat diterima”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan Aparat Pengawasan, maka semakin bermutu hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil analisis korelasi dan regresi antara variabel Pendidikan Aparat Pengawas dan Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler menunjukkan bahwa model regresi $\hat{Y} = 35,016 + 0,865 X_1 + e$ dengan koefisien korelasi sebesar 0,453 pada taraf signifikansi 95% diperoleh pengertian bahwa variabel pendidikan aparat pengawas (X_1) dapat meramalkan (memprediksi) variabel mutu hasil pemeriksaan reguler.

Variabel pendidikan aparat pengawas ini memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel mutu hasil pemeriksaan reguler dan determinasi yang berarti. Koefisien determinasi menunjukkan 20,5 % variasi yang terjadi pada mutu hasil pemeriksaan reguler dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan aparat pengawas. Pengaruh variabel pendidikan aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler tersebut, berdasarkan rumusan regresi dapat dijelaskan bahwa jika tidak ada variabel pendidikan aparat pengawas, maka nilai mutu hasil pemeriksaan reguler adalah sebesar 35,016. Pemberian perlakuan satu satuan terhadap pendidikan aparat pengawas akan meningkatkan nilai mutu hasil

pemeriksaan sebesar 0,865. Maka penulis dalam hal ini lebih menekankan arti pentingnya pendidikan baik yang bersifat pendidikan formal dan pendidikan nonformal sangatlah besar pengaruhnya, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan aparat pengawasan, maka semakin tinggi pula intelektual yang dimilikinya.

Sesuai dengan hasil analisis korelasi dan regresi antara variabel Pengalaman Aparat Pengawas dan Mutu Hasil Pemeriksaan Reguler menunjukkan bahwa model regresi $\hat{Y} = 32,817 + 1,009 X_2 + \varepsilon$ dengan koefisien korelasi sebesar 0,434 pada taraf signifikansi 95% diperoleh pengertian bahwa variabel pengalaman aparat pengawas (X_2) dapat meramalkan (memprediksi) mutu hasil pemeriksaan reguler.

Variabel pengalaman aparat pengawas ini memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel mutu hasil pemeriksaan reguler dan determinasi yang berarti. Koefisien determinasi menunjukkan 18,9% variasi yang terjadi pada mutu hasil pemeriksaan reguler dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman aparat pengawas. Pengaruh variabel pengalaman aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler tersebut, berdasarkan rumusan regresi dapat dijelaskan bahwa jika tidak ada variabel pengalaman aparat pengawas, maka nilai mutu hasil pemeriksaan reguler adalah sebesar 32,817. Pemberian perlakuan satu satuan terhadap pendidikan aparat pengawas akan meningkatkan nilai mutu hasil pemeriksaan sebesar 1,009. Hal ini juga menunjukkan bahwa seorang mempunyai pengalaman akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah, karena pada prinsipnya sudah terbiasa melakukannya dan juga akan menambah wawasan. Pengaruh pengalaman akan meningkatkan kompleksitas tugas dalam bidang pengauditan. Hal ini dapat diartikan pengalaman merupakan suatu faktor untuk

menilai seberapa lama seseorang mengetahui atau bertukar pengetahuan dengan orang lain untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. Hal ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh Haryadi (1992 : 103) yaitu :

Karena faktor pengalaman (langsung) memang berperan penting bagi pertumbuhan sikap yang kuat terhadap suatu objek. Dengan pengalaman kerja yang cukup, maka keterampilan auditor internal dalam melaksanakan audit tidak diragukan lagi, begitu juga dalam hal memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dan pengalaman dalam bekerja maka auditor internal dapat menghasilkan informasi dan saran yang diharapkan oleh pemakai. Selain harus memiliki pendidikan, pengalaman auditor internal juga harus mengikuti pelatihan. Pelatihan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap dan keterampilan serta pengetahuan individu yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/badan/organisasi.

Selanjutnya hasil analisis statistik juga menunjukkan bahwa meskipun dikontrol oleh variabel pendidikan dan pengalaman aparat pengawas, variabel pelatihan aparat pengawas tetap berarti. Hal ini merupakan landasan dalam upaya meningkatkan mutu hasil pemeriksaan reguler melalui peningkatan pelatihan aparat pengawas. Tidak akan tercapai mutu hasil pemeriksaan reguler yang optimal jika variabel pelatihan aparat pengawas tidak dikembangkan dengan optimal. Dengan kata lain, untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan reguler perlu optimalisasi pelatihan aparat pengawas.

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi antara variabel pelatihan aparat pengawas dengan mutu hasil pemeriksaan reguler menunjukkan bahwa model regresi $\hat{Y} = 31,188 + 1,160 X_3 + \epsilon$ dengan koefisien korelasi sebesar 0.531 pada taraf signifikansi 95% diperoleh pengertian bahwa variabel pelatihan aparat pengawas (X_3) dapat memprediksi mutu hasil pemeriksaan reguler. Variabel pelatihan aparat pengawas ini memiliki hubungan dan pengaruh determinasi yang

berarti. Koefisien determinasi menunjukkan 28,2% variasi yang terjadi pada mutu hasil pemeriksaan reguler dapat dijelaskan oleh pelatihan aparat pengawas.

Pengaruh variabel pelatihan aparat pengawas terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler tersebut, berdasarkan rumusan regresi dapat dijelaskan bahwa jika tidak ada variabel pelatihan aparat pengawas, maka nilai mutu hasil pemeriksaan reguler adalah sebesar 31,188. Pemberian perlakuan satu satuan terhadap pelatihan aparat pengawas, akan meningkatkan mutu hasil pemeriksaan reguler sebesar 1,160. Untuk itu sangatlah penting bahwa pelatihan memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi maupun karyawan. Tujuan dari pelatihan merupakan suatu mengembangkan keahlian, pengetahuan dan sikap sehingga dapat menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat, efektif dan dapat diselesaikan dengan secara rasional.

Berdasarkan analisa regresi, korelasi dan determinasi dapat dijelaskan bahwa mutu hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh pendidikan aparat pengawasan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal serta latar belakang pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh aparat pengawasan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimilikinya yang akan semakin mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya yaitu melakukan pemeriksaan yang mana akan berdampak pada kualitas mutu hasil pemeriksaannya, baik pada saat melakukan perencanaan pemeriksaan dengan menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan dan menentukan jenis pemeriksaan.

Pada saat pelaksanaan pemeriksaan latar belakang pendidikan aparat yang semakin tinggi akan mempengaruhi dalam berfikir lebih logis pada saat memeriksa bukti-bukti pemeriksaan, memiliki kemampuan analisis lebih rasional dan pada saat pengerjaan kertas kerja pemeriksaan dan lebih efektif menerapkan sistem pengawasan. Pada saat pelaporan, semakin tinggi dan baik latar belakang pendidikan aparat pengawasan akan berdampak pada mutu hasil pemeriksaan yang sesuai dengan norma-norma pelaporan, semakin konsisten dan menghasilkan rekomendasi yang baik, tertulis dan tepat waktu pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan hasil analisis regresi, korelasi dan determinasi diatas dapat dijelaskan bahwa mutu hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi juga oleh pengalaman yang dimiliki aparat pengawasan. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki aparat pengawas maka akan semakin mudah melaksanakan pemeriksaan dikarenakan telah terbiasa menyelesaikan setiap permasalahan dan banyak wawasan yang dimiliki berdasarkan pengalaman-pengalaman melaksanakan pemeriksaan sebelumnya yang akan berdampak semakin baiknya mutu hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil analisa regresi, korelasi dan determinasi dapat dijelaskan bahwa mutu hasil pemeriksaan juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat pengawasan. Dengan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat pengawasan didalam melaksanakan pemeriksaan. Program pelatihan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi aparat pengawasan serta mengatasi kelemahan-kelemahan aparat pengawasan.

Pada saat melaksanakan perencanaan pemeriksaan, aparat pengawasan yang memiliki pengalaman akan lebih tepat menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan dan menentukan jenis pemeriksaan karena telah terbiasa melakukan hal tersebut. Pada saat melaksanakan pemeriksaan, aparat pengawas yang memiliki pengalaman lebih banyak, akan lebih baik dalam melaksanakan sistem pengawasan, lebih terperinci dalam memeriksa bukti-bukti pemeriksaan dan lebih lengkap dalam membuat kertas kerja pemeriksaan dibandingkan aparat pengawasan yang belum berpengalaman.

Mutu hasil pemeriksaan akan semakin baik seiring dengan banyaknya pengalaman dan permasalahan yang dihadapi aparat pengawasan, maka laporan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan norma-norma pemeriksaan, tepat waktu dan konsisten pasti akan dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang berpengalaman. Kemampuan aparatur pengawas fungsional pemerintah yang tugasnya mengawasi keuangan daerah haruslah memiliki pendidikan, pengetahuan, pengalaman, serta pelatihan. Dan juga kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang perlu dilakukan dan dipertahankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian baik secara Deskriptif maupun secara Statistik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat Pendidikan yang tinggi sudah dapat dipastikan bahwa akan memiliki kualitas tinggi, begitu juga dengan pengalaman melakukan Pemeriksaan, karena banyaknya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka para aparat pengawasan semakin matang dalam melakukan pemeriksaan. Jika dilihat dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan bagi aparat pengawasan, maka masih terdapat pendidikan dan pelatihan teknis yang belum diikuti oleh aparat pengawasan, terutama yang berkaitan dengan masalah audit keuangan daerah dan audit investigasi sehingga kemampuan aparat pengawasan masih dapat ditingkatkan lagi. Laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang sudah ditentukan, hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kerja tim yang mana aparat pengawasan harus memaparkan hasil temuan pemeriksaan dan dibahas

bersama tim pemeriksa menyangkut kelayakan suatu temuan pemeriksaan dan penetapan temuan pemeriksaan.

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan, pengalaman dan pelatihan secara bersama-sama terhadap mutu hasil pemeriksaan reguler. Ini berarti ketiga variabel yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan secara bersama-sama mempengaruhi variabel mutu hasil pemeriksaan reguler. Hal ini membuktikan hipotesis.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki aparat pengawasan maka semakin tinggi pula kemampuan intelektual yang dimilikinya yang akan semakin mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya. Pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengawasan dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap dan bertindak, dan pelatihan yang baik diikuti oleh aparat pengawasan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat mengoptimalkan potensi aparat pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Agar aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diikutsertakan dalam program-program pendidikan yang diadakan oleh BPKP Khusus untuk APFP baik itu pendidikan dan pelatihan fungsional seperti Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk pembentukan auditor bersertifikat maupun pendidikan dan pelatihan

teknis seperti Diklat Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APFP Daerah) yang dapat membekali aparat pengawasan dengan teknis dalam melaksanakan pemeriksaan intern/pembinaan dilingkup Dinas-Dinas, Badan dan Sekretariat Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam upaya meminimalkan penyimpangan-penyimpangan dan temuan-temuan. Serta diklat teknis audit perencanaan yang dapat membekali para aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan program perencanaan yang dibuat oleh SKPD-SKPD dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

2. Agar diadakan pelatihan kantor sendiri dimana pelatihan ini berguna bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan pelatihan kantor sendiri diharapkan dapat membekali para CPNS untuk dapat memahami tugas pokoknya dan mempersiapkan aparat pengawasan yang memiliki kompetensi yang handal dalam melaksanakan tugasnya kedepan.
3. Agar Kepala Inspektorat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung hendaknya dapat berkoordinasi dalam penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan pada Inspektorat Daerah dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung agar penempatan CPNS pada Inspektorat Daerah memang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengawasi variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini. Peneliti menduga bahwa mutu hasil pemeriksaan reguler tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi aparat

pengawasan saja, namun dipengaruhi juga faktor-faktor lain yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengambil unit analisis lain yang dijadikan sebagai populasi peneliti yang berbeda dan cakupannya lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada Inspektorat Daerah saja.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Dirhana. (2002). *Lembaga Pengawasan Pemerintah Sebagai Penagkal Korupsi*. Wacana Kinerja, Vol 5 Nomor 3
- Departemen Dalam Negeri. (1999). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 22: Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 33: Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Dalam Negeri. (2003). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang Undang Republik Indonesia No. 20: Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus Media.
- Husnan, S dan Heidjrachman. (2002). *Management Personalia*. Edisi keempat. Yogyakarta:BPFE.
- Irawan, P. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Kesatu, Cetakan Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). *Paradigma Baru Profesi Akuntansi Memasuki Milenium Ketiga*. Buku kedua, cetakan Pertama. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Profesional Akuntansi Publik*. Jakarta:
- Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. (2001). *Himpunan Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 20: Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri.
- Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. (2008). *Himpunan Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 5: Tata Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintah Daerah*. Jakarta: Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri.
- Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. (2008). *Himpunan Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 41: Perubahan Nomenklatur Bawasda Menjadi Inspektorat Daerah*. Jakarta: Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri.

- Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri. (2007). *Himpunan Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 23: Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri.
- Jhon M, Y dan Setiawan Dwi. (2009). *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Moekiyat. (1993). *Evaluasi Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Malayu, Hasibuan S P. (2002). *Managemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Malo, Manasse. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Indonesia: Ghalia
- Pratisto, Arif. (2009). *Statistik Menjadi Rumah dengan SPSSVersi 17*. Jakarta: Eka Media Komputindo.
- Pamuji, S. (1994). *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Widya Praja Nomor 19 Tahun Ketiga. Jakarta: IIP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 20. Tahun (2001). *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 5. Tahun (2008). *Tentang Tata Cara Pengawasan Umum Atas Jelannya Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 41. Tahun (2008). *Tentang Perubahan Normakultur dari Bawasda Menjadi Inspektorat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 23. Tahun (2007). *Tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Tentang Kepala Bangka Belitung, Nomor 64. Tahun (2008). *Tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- PPA – STAN. (1985). *Pemeriksaan Intern*. Jakarta: Lembaga Penerbit STAN
- R. Greer, Charles. (2001). *Strategi Human Resource Management A General Managerial Approach*. Secard Edition. Prentice Hall. New Jersey: Seddle Rever.
- Singarimbun, Masri. (1991). *Metode Penelitian dan Survey*. Jakarta: Pustaka.

- Supriyono dan Harjono Yusuf. (1990). *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sujanto. (1994). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Suier Grafika.
- Sumarjo. (2001). *Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Teman*. Cetakan Pertama. Jakarta: Laksamana Mandiri.
- Syafitri Harahap, Sofyan. (2001). *Sistem Pengawasan Management*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Soetedjo. (2003). *Profesionalisme Auditor Intern Pemerintah dan Tantangannya Mengkadang*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Sugino. (2007). *Metode Peneliti Administrasi*. Cetakan Kelima. Jakarta: Alfa Beta.
- Siagian, Sondang P. (1999). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bunga Aksara.
- Tugiman, Hiro. (1997). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun. (1999). *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun. (1999). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun, (2003). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun. (1974). *Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah*.
- Warsanto, IG. (1985). *Dasar-dasar Management Personalia*. Jakarta: Dian Pustaka.
- Yani, Irsan. (1985). *Petunjuk Pemeriksaan Operasional. Pusat Pengembangan Akuntansi STAN*. Jakarta:

Kuisisioner Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengawas Terhadap Mutu Hasil
Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disusun oleh :

Yulizar Adnan

Nim. 015551488

UNIVERSITAS TERBUKA

Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Terbuka

Pangkalpinang, April 2010

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / sdr / i

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi saya pada program pascasarjana magister administrasi publik pada universitas terbuka, saya bermaksud menyusun tesis yang berjudul : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengawas terhadap Mutu Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun kuisisioner ini saya ajukan sebagai salah satu alat bantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu mohon kiranya bapak / ibu berkenan mengisi atau memberi jawaban atas pernyataan / pertanyaan yang diajukan. Pernyataan / pertanyaan yang diajukan sepenuhnya hanya untuk tujuan ilmiah dan tidak berpengaruh terhadap kedudukan atau kepentingan bapak / ibu.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran kuisisioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas bapak / ibu, namun dengan segala kerendahan hati, saya memohon kiranya bapak / ibu berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner ini.

Demikian agar maklum dan atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

H. Yulizar Adnan

Pendidikan

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Bagaimana pendapat sdr, apabila persyaratan untuk mendapat sertifikasi auditor ditentukan oleh jenjang pendidikan.					
2.	Pendidikan non formal yang diikuti oleh aparat pengawasan akan membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan aparat pengawasan.					
3.	Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Pengalaman

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Lamanya bekerja pada kantor Inspektorat Daerah akan dapat mengenal organisasi inspektorat daerah secara lebih dekat.					
2.	Berbagai macam pengalaman pemeriksaan pada kantor inspektorat daerah akan menjadikan pemeriksaan memiliki cara berfikir yang lebih terperinci.					
3.	Pengalaman kerja sebagai auditor di tempat lain akan mempengaruhi kemampuan mendeteksi, memahami dan mencari penyebab kesalahan secara akurat.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Pelatihan

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Berbagai pelatihan audit yang pernah diikuti merupakan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pemeriksaan.					
2.	Lamanya waktu pelatihan audit akan banyak menyerap materi untuk menambah kemampuan pemeriksaan.					
3.	Materi pelatihan audit apabila sesuai dengan standar audit pemerintah maka dapat mempermudah pelaksanaan pemeriksaan.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Perencanaan Pemeriksaan

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Dalam setiap pengawasan pemeriksaan, penentuan ruang lingkup pemeriksaan sangat diperlukan.					
2.	Dalam setiap pengawasan pemeriksaan, seorang pemeriksa harus berpatokan pada program kerja pengawas.					
3.	Setiap penugasan pemeriksaan, seorang pemeriksa harus mengetahui jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Pelaksanaan Pemeriksaan

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Seorang pemeriksa harus mengetahui sistem pemeriksaan yang sedang dilaksanakannya dan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan.					
2.	Seorang pemeriksa harus dapat menemukan bukti pengawasan yang cukup, kompeten, dan relevan.					
3.	Dalam melakukan pemeriksaan, seorang pemeriksa harus membuat catatan dari data – data yang dikumpulkan secara sistematis yang dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.					

UNIVERSITAS TERBUKA

Pelaporan

No.	Pernyataan	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Ragu-ragu (3)	Tdk setuju (2)	Sangat tdk setuju (1)
1.	Sistem pelaporan yang dibuat oleh setiap pemeriksa harus sesuai dengan norma pelapor, setiap menyusun hasil pemeriksaan, seorang pemeriksa harus berdasarkan dengan norma - norma pelapor.					
2.	Laporan hasil pemeriksaan yang telah dibuat, harus konsisten dengan temuan pemeriksaan.					
3.	Rekomendasi yang dibuat oleh pemeriksa merupakan pedoman bagi pimpinan SKPD untuk melakukan tindakan perbaikan.					
4.	Setiap laporan hasil pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas pemeriksaan.					

Data uji coba Dimensi Pendidikan (X1)

no Responden	Butir			Skor
	1	2	3	
1	5	5	5	15
2	4	4	5	13
3	5	5	5	15
4	4	4	4	12
5	4	4	4	12
6	5	5	4	14
7	5	4	2	11
8	5	5	5	15
9	4	4	4	12
10	5	5	5	15
11	5	5	5	15
12	2	4	4	10
13	5	4	4	13
14	5	4	4	13
15	4	5	5	14
16	4	4	5	13
17	5	5	4	14
18	4	5	5	14
19	5	5	5	15
20	4	5	5	14
21	4	5	4	13
22	5	5	4	14
23	5	5	2	12
24	4	4	4	12
25	5	4	3	12
26	5	5	5	15
27	5	5	5	15
28	5	5	5	15
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15
31	2	4	4	10
	139	143	135	

Data uji coba Dimensi Pengalaman (X2)

no	Butir			skor
Responden	1	2	3	
1	5	5	5	15
2	4	5	4	13
3	5	5	5	15
4	4	4	4	12
5	4	4	4	12
6	5	5	4	14
7	4	5	5	14
8	5	5	5	15
9	4	4	4	12
10	5	5	5	15
11	5	5	5	15
12	4	4	5	13
13	5	4	5	14
14	4	4	4	12
15	5	5	5	15
16	5	5	4	14
17	5	5	5	15
18	5	5	4	14
19	4	4	4	12
20	5	4	5	14
21	4	4	4	12
22	5	5	4	14
23	4	4	4	12
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	5	5	5	15
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15
31	4	4	5	13
	142	142	141	

Data uji coba Dimensi Pelatihan (X3)

no Responden	Butir			skor
	1	2	3	
1	5	2	5	12
2	5	2	4	11
3	5	5	5	15
4	4	3	4	11
5	4	2	4	10
6	5	5	4	14
7	5	3	5	13
8	4	5	5	14
9	4	4	4	12
10	5	5	5	15
11	5	5	5	15
12	4	5	4	13
13	4	4	4	12
14	5	5	4	14
15	5	5	4	14
16	5	4	4	13
17	5	4	5	14
18	5	4	5	14
19	5	4	5	14
20	5	4	4	13
21	4	4	4	12
22	5	4	5	14
23	5	4	4	13
24	4	4	4	12
25	5	3	5	13
26	5	4	4	13
27	5	5	5	15
28	5	5	5	15
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15
31	4	5	4	13
	146	128	139	

Data uji coba Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan (Y)

No	Butir										skor
Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	42
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
7	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
8	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
9	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
10	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	45
13	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	44
14	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	47
15	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
16	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
17	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
18	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	43
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
20	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	45
21	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	45
22	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
23	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
24	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
31	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	45
	141	139	143	140	147	150	146	148	147	145	

Uji Validitas Dimensi Pendidikan

Correlations

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.482(**)	.033	.697(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.006	.859	.000
	N	31	31	31	31
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.482(**)	1	.422(*)	.802(**)
	Sig. (2-tailed)	.006	.	.018	.000
	N	31	31	31	31
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.033	.422(*)	1	.695(**)
	Sig. (2-tailed)	.859	.018	.	.000
	N	31	31	31	31
skor	Pearson Correlation	.697(**)	.802(**)	.695(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Dimensi Pengalaman

Correlations

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.735(**)	.542(**)	.901(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.002	.000
	N	31	31	31	31
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.735(**)	1	.411(*)	.849(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.022	.000
	N	31	31	31	31
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.542(**)	.411(*)	1	.775(**)
	Sig. (2-tailed)	.002	.022	.	.000
	N	31	31	31	31
skor	Pearson Correlation	.901(**)	.849(**)	.775(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Dimensi Pelatihan

Correlations

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	skor
Pertanyaan 1	Pearson				
	Correlation	1	.423(**)	.564(**)	.817(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95
Pertanyaan 2	Pearson				
	Correlation	.423(**)	1	.475(**)	.816(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000
	N	95	95	95	95
Pertanyaan 3	Pearson				
	Correlation	.564(**)	.475(**)	1	.794(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000
	N	95	95	95	95
skor	Pearson				
	Correlation	.817(**)	.816(**)	.794(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.
	N	95	95	95	95

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UNIVERSITAS TERBUKA

Uji Validitas Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan

Correlations

Correlations

		skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	.671(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.563(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	31
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.679(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.527(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	31
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.690(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.581(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	31
Pertanyaan 7	Pearson Correlation	.681(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
Pertanyaan 8	Pearson Correlation	.545(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	31
Pertanyaan 9	Pearson Correlation	.741(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
Pertanyaan 10	Pearson Correlation	.677(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
skor	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Dimensi Pelatihan

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	29.5
	Excluded (a)	74	70.5
	Total	105	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	3

Uji Reliabilitas Mutu Hasil Pemeriksaan

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	29.5
	Excluded (a)	74	70.5
	Total	105	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	10

Uji Reliabilitas Dimensi Pendidikan

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	29.5
	Excluded (a)	74	70.5
	Total	105	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	3

Uji Reliabilitas Dimensi Pengalaman

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	29.5
	Excluded (a)	74	70.5
	Total	105	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	3

Frequency Table

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	2	6.5	6.5	6.5
	11	1	3.2	3.2	9.7
	12	6	19.4	19.4	29.0
	13	5	16.1	16.1	45.2
	14	6	19.4	19.4	64.5
	15	11	35.5	35.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	9	29.0	29.0	29.0
	13	3	9.7	9.7	38.7
	14	7	22.6	22.6	61.3
	15	12	38.7	38.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Pengalaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	1	3.2	3.2	3.2
	11	2	6.5	6.5	9.7
	12	5	16.1	16.1	25.8
	13	8	25.8	25.8	51.6
	14	8	25.8	25.8	77.4
	15	7	22.6	22.6	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Mutu Hasil Pemeriksaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40	1	3.2	3.2	3.2
	41	1	3.2	3.2	6.5
	42	1	3.2	3.2	9.7
	43	3	9.7	9.7	19.4
	44	1	3.2	3.2	22.6
	45	4	12.9	12.9	35.5
	46	1	3.2	3.2	38.7
	47	5	16.1	16.1	54.8
	48	5	16.1	16.1	71.0
	49	1	3.2	3.2	74.2
	50	8	25.8	25.8	100.0
Total		31	100.0	100.0	

UNIVERSITAS TERBUKA

Statistik Deskriptif Data

Frequencies

Statistics

		Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	Mutu Hasil Pemeriksaan
N	Valid	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0
Mean		13.45	13.71	13.32	46.65
Std. Error of Mean		.278	.228	.243	.530
Median		14.00	14.00	13.00	47.00
Mode		15	15	13(a)	50
Std. Deviation		1.546	1.270	1.351	2.950
Variance		2.389	1.613	1.826	8.703
Skewness		-.714	-.350	-.550	-.594
Std. Error of Skewness		.421	.421	.421	.421
Kurtosis		-.396	-1.588	-.240	-.583
Std. Error of Kurtosis		.821	.821	.821	.821
Range		5	3	5	10
Minimum		10	12	10	40
Maximum		15	15	15	50
Sum		417	425	413	1446
Percentiles	10	11.20	12.00	11.20	42.20
	20	12.00	12.00	12.00	43.40
	25	12.00	12.00	12.00	45.00
	30	12.60	12.60	13.00	45.00
	40	13.00	13.80	13.00	46.80
	50	14.00	14.00	13.00	47.00
	60	14.00	14.20	14.00	48.00
	70	15.00	15.00	14.00	48.40
	75	15.00	15.00	14.00	50.00
80	15.00	15.00	15.00	50.00	
90	15.00	15.00	15.00	50.00	

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Analisis Regresi X1-Y

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendidikan(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453(a)	.205	.178	2.675

a Predictors: (Constant), Pendidikan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.573	1	53.573	7.487	.010(a)
	Residual	207.523	29	7.156		
	Total	261.097	30			

a Predictors: (Constant), Pendidikan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.016	4.277		8.186	.000
	Pendidikan	.865	.316	.453	2.736	.010

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	43.66	47.98	46.65	1.336	31
Residual	-6.119	4.610	.000	2.630	31
Std. Predicted Value	-2.233	1.002	.000	1.000	31
Std. Residual	-2.288	1.723	.000	.983	31

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Analisis Regresi X2-Y

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pengalaman (a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.434(a)	.189	.161	2.703

a Predictors: (Constant), pengalaman

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.229	1	49.229	6.738	.015(a)
	Residual	211.867	29	7.306		
	Total	261.097	30			

a Predictors: (Constant), pengalaman

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.817	5.349		6.135	.000
	pengalaman	1.009	.389	.434	2.596	.015

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	44.92	47.95	46.65	1.281	31
Residual	-6.947	5.079	.000	2.657	31
Std. Predicted Value	-1.346	1.016	.000	1.000	31
Std. Residual	-2.570	1.879	.000	.983	31

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Analisis Regresi X3-Y

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelatihan(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531(a)	.282	.258	2.542

a Predictors: (Constant), Pelatihan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.728	1	73.728	11.411	.002(a)
	Residual	187.359	29	6.461		
	Total	261.097	30			

a Predictors: (Constant), Pelatihan

b Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.188	4.598		6.783	.000
	Pelatihan	1.160	.343	.531	3.378	.002

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	42.79	48.59	46.65	1.568	31
Residual	-6.431	4.889	.000	2.499	31
Std. Predicted Value	-2.459	1.241	.000	1.000	31
Std. Residual	-2.530	1.924	.000	.983	31

a Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

Korelasi

Correlations

Correlations

		Pendidikan	pengalaman	Pelatihan	Mutu Hasil Pemeriksaan
Pendidikan	Pearson Correlation	1	.527(**)	.598(**)	.453(*)
	Sig. (2-tailed)	.	.002	.000	.010
	N	31	31	31	31
pengalaman	Pearson Correlation	.527(**)	1	.639(**)	.434(*)
	Sig. (2-tailed)	.002	.	.000	.015
	N	31	31	31	31
Pelatihan	Pearson Correlation	.598(**)	.639(**)	1	.531(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.002
	N	31	31	31	31
Mutu Hasil Pemeriksaan	Pearson Correlation	.453(*)	.434(*)	.531(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.015	.002	.
	N	31	31	31	31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UNIVERSITAS TERBUKA

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	Variabel Pelatihan, Variabel Pendidikan, Variabel Pengalaman		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.564 ^a	.318	.242	2.568

a. Predictors: (Constant), Variabel Pelatihan, Variabel Pendidikan, Variabel Pengalaman

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	83.065	3	27.688	4.199	.015 ^a
Residual	178.031	27	6.594		
Total	261.097	30			

a. Predictors: (Constant), Variabel Pelatihan, Variabel Pendidikan, Variabel Pengalaman

b. Dependent Variable: Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan

Coefficients^a

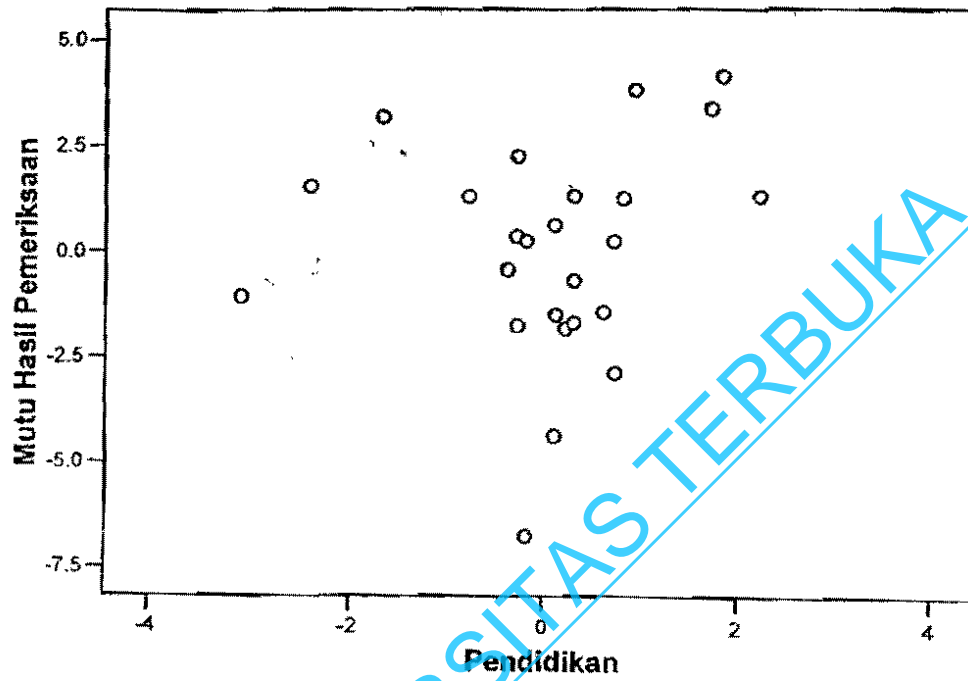
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.143	5.489		5.127	.000
Variabel Pendidikan	.352	.389	.184	.904	.374
Variabel Pengalaman	.266	.494	.115	.539	.594
Variabel Pelatihan	.759	.492	.348	1.543	.135

a. Dependent Variable: Variabel Mutu Hasil Pemeriksaan

Charts

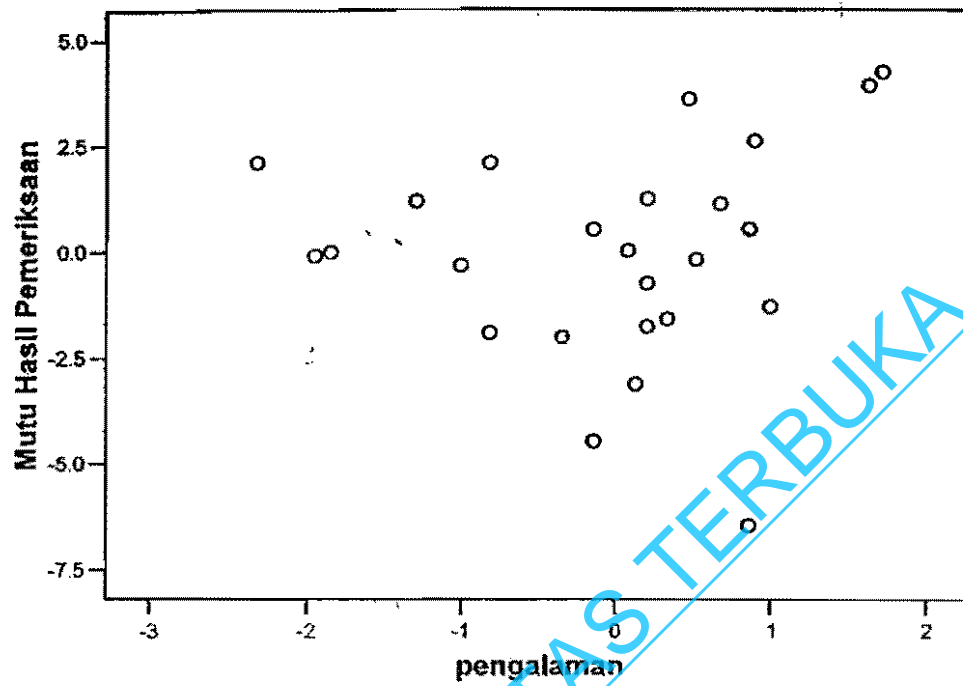
Partial Regression Plot

Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan



Partial Regression Plot

Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan



Partial Regression Plot

Dependent Variable: Mutu Hasil Pemeriksaan

